

MANAJEMEN INFORMASI DAN PENGETAHUAN DALAM PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor populer dalam pembangunan daerah; sebagaimana nampak dalam berbagai kasus kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), salah hal yang dijanjikan adalah memajukan pendidikan misalnya dengan pendidikan gratis. Namun dalam kenyataannya, komitmen pemenang pilkada terhadap dunia pendidikan, kurang sepadan dengan apa yang telah dijanjikan kepada para konstituen.

Berbagai regulasi telah dibuat dan diberlakukan. Beberapa undang-undang kaitmengan, misalnya undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003); yang mengatur kewenangan pusat dan daerah (UU 32/2004 pengganti UU 22/1999). Dalam sistem desentralisasi masalah utamanya adalah penataan kewenangan pusat – daerah dalam semangat *power sharing*; dan regulasi untuk ini senantiasa mengalami penyempurnaan misalnya PP no.38/2007 disempurnakan dengan PP no.17/2010 dan PP no.66/2010, disusul dengan Permendiknas no.15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, penyempurnaan Keputusan Mendiknas no.1291/U/2004. Memang pendidikan merupakan salah satu urusan yang didesentralisasikan ke daerah, yang berarti juga harus mengikuti rambu dalam pelayanan publik; yang terikat di dalam satu sistem pendidikan nasional. Meskipun substansi suatu regulasi sudah bagus, tidak sertamerta implementasi dari regulasi tersebut akan bagus, dan menghasilkan manfaat yang bagus dalam pelayanan publik.

Masih dapat lebih difahami kalau pada awal penerapan desentralisasi pendidikan, ditemukan banyak ketidak siapan (Bank Dunia, 2004), dan kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Namun, lima tahun kemudian masih ditemukan juga adanya keraguan atas kapasitas daerah untuk mengurus pendidikan, sebagaimana terungkap dalam berbagai penelitian. Investasi pendidikan di kabupaten/kota belum berhasil (Bank Dunia, 2009). Pelaksanaan kebijakan penuntasan

wajar dikdas, seperti BOS, USB, RKB, tak jelas kaitannya dengan peningkatan APK/APM (Sukardi, dkk, 2007). Kapabilitas manajemen dinas pendidikan kabupaten/kota masih rendah (Sumarno, dkk, 2008). Kebijakan sekolah gratis menimbulkan berbagai akses (Sumarno, dkk, 2009). Pada level sekolah, realisasi standar nasional pendidikan, masih belum terjadi meskipun hanya sebagai standar pelayanan minimal (Anik Gufron, dkk, 2009). Kondisi pendidikan yang bermasalah ini sangat mendesak memerlukan pemecahan yang tepat.

Pemecahan masalah tersebut terkait dengan: a) harus diketemukan sumber masalah yang tepat; karena penetapan masalah yang harus dipecahkan juga dapat keliru; b) pendekatan pemecahan harus sesuai dengan semangat desentralisasi, di mana kewenangan teknis operasional berada di daerah, meskipun kebijakan dirumuskan oleh pemerintah pusat; dan c) pemecahan masalah yang tepat mendasarkan pada pengetahuan dan informasi yang tepat dan akurat. Terkait dengan butir c ini, peran manajemen pengetahuan dan informasi sangat esensial; oleh karena itu untuk memajukan pendidikan diperlukan kapasitas kelembagaan yang kuat dalam manajemen pengetahuan dan informasi, sejalan dengan kemajuan industri dan tuntutan perkembangan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

B. Rumusan masalah

Terkait dengan hal tersebut, ada tiga masalah penting yang menjadi fokus usulan ini.

- 1) Bagaimanakah kondisi yang ada manajemen pengetahuan dan informasi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan di daerah, termasuk di satuan pendidikan.
- 2) Bagaimanakah model evaluasi berbasis kinerja yang tepat untuk menghasilkan informasi strategis, yang dapat diolah menjadi pengetahuan dan pada gilirannya terintegrasi dengan proses pembangunan pendidikan daerah.
- 3) Bagaimanakah meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam hal manajemen pengetahuan dan informasi yang mampu memberikan dukungan optimal bagi proses pembangunan pendidikan.

Ketiga masalah tersebut dirancang sebagai penelitian tiga tahun; dan untuk tahun pertama ini difokuskan pada masalah pertama yaitu asesmen kebutuhan pengembangan ditinjau dari perspektif manajemen berbasis pengetahuan.

C. Road map penelitian

Berbagai studi terdahulu yang sudah dilakukan di antaranya yang utama adalah:

- 1) Bank Dunia (2004) mengidentifikasi minimalnya pemenuhan persyaratan yang mestinya dimiliki daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan.
- 2) Sukardi, dkk (2007) meneliti efikasi implementasi program perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar oleh pemerintah daerah, dan hasilnya memang program terlaksana, akan tetapi andilnya terhadap peningkatan APK/`APM tidak terlalu jelas.
- 3) Bank Dunia (2009) menemukan bahwa investasi di tingkat kabupaten/kota dalam bidang pendidikan tidak selalu menjanjikan kemanfaatan yang optimal; beberapa daerah dengan indek input tinggi, ternyata tidak selalu menghasilkan indek output tinggi, ada yang justru menghasilkan indek output rendah.
- 4) Sumarno dkk (2008) meneliti *agenda setting* kebijakan sekolah gratis, yang semua diduga terkait dengan kemampuan finansial daerah, ternyata kurang dapat ditemukan perbedaan yang jelas antar daerah dengan kemampuan finansial yang berbeda.
- 5) Sumarno & Hiryanto (2009) mencoba menghasilkan instrumen untuk memotret kinerja daerah dalam pembangunan pendidikan, dengan visualisasi hasil berupa diagram sarang laba-laba yang mudah dibaca. Namun hasil ini masih sangat embrional, masih dirasa teknis pemakaiannya memberatkan responden daerah, dan belum menyentuk secara tajam kapasitas daerah dalam manajemen pengetahuan dan informasi. Di samping itu, pada tahun 2009 tersebut belum terbit Permendiknas mengenai SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota.

Fokus dari kegiatan penelitian yang diusulkan ini ada tiga hal:

- 1) Melakukan eksplorasi, identifikasi kebutuhan, dan pemahaman persoalan yang terjadi atau dihadapi daerah dalam melakukan manajemen pengetahuan dan informasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan. Kegiatan tahun pertama difokuskan pada asesmen kebutuhan ini.
- 2) Mengembangkan model dan instrumen evaluasi kinerja daerah yang tepat dan praktis, yang mampu menghasilkan informasi penting yang dapat diolah menjadi pengetahuan berharga, untuk ditindak-lanjuti dalam memajukan pendidikan

daerah. Diharapkan model ini lebih praktis dan sudah dapat mengacu pada standar pelayanan minimal pendidikan daerah.

- 3) Mengembangkan model penguatan kapasitas daerah dalam manajemen pengetahuan dan informasi; sebagai kelanjutan dari dihasilkannya model evaluasi kinerja daerah. Dengan kata lain, setelah daerah berhasil melakukan evaluasi diri atas kinerjanya dalam sektor pendidikan, dengan pendampingan yang tepat akan mulai dapat dihidupkan manajemen yang efektif dalam menghasilkan informasi dan mengelola pengetahuan sehingga menghasilkan kemanfaatan optimal bagi kemajuan pendidikan.

D. Tujuan

- 1) Menghasilkan produk substantif berupa model rekayasa sosial berupa: a) model dan instrumen evaluasi kinerja daerah; dan b) model penguatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen informasi dan pengetahuan untuk pembangunan pendidikan daerah sebagai bagian dari pendidikan nasional.
- 2) Menghasilkan buku bahan ajar sebagai bacaan pengayaan dalam matakuliah Perencanaan Pendidikan (S3 Ilmu Pendidikan), Filsafat Manajemen Pendidikan (S3 Manajemen Pendidikan), Metodologi Penelitian dan Evaluasi (S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan) untuk aspek konseptualnya, dan juga dapat dimanfaatkan aspek teknis operasionalnya di S2 dan S1 (PLS).
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian ke dalam jurnal nasional terakreditasi, misalnya: Cakrawala Pendidikan (LPM-UNY), (Evaluasi Pendidikan (HEPI-Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia)
- 4) Memberikan bantuan teknis profesional kepada daerah, misalnya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan, dan lokakarya/rapat kerja; yang selama ini sudah seringkali ada kerjasama.

E. Penerapan hasil kegiatan

Produk akhir kegiatan ini memiliki nilai strategis untuk pemberdayaan dan penguatan organisasi penyelenggara, pelaksana, pengelola pendidikan dengan fungsi manajemen pengetahuan dan informasi, terpadu dengan fungsi evaluasi berbasis kinerja. Kemajuan

teknologi komunikasi dan informasi membuka peluang dan tantangan setiap organisasi pendidikan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya, dengan melakukan evaluasi berbasis indikator manfaat nyata yang terukur, dan melakukan proses-proses menghasilkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi serta pengetahuan secara optimal.

F. URAIAN KEGIATAN

Sebagaimana dikemukakan di dalam uraian peta jalan kegiatan; kegiatan ini merupakan kelanjutan penelitian strategis nasional yang dikerjakan tahun 2009 yang lalu. Perlu dicatat bahwa pada awal sekali, belum ada kesempatan untuk membuat usulan multi-tahun. Pada waktu itu yang sudah dihasilkan adalah model embrional evaluasi kinerja pembangunan pendidikan daerah; dan hasilnya sudah didiseminasikan melalui seminar diseminasi hasil penelitian (Lembaga Penelitian UNY 2010), dan seminar nasional DP2M 2010), serta sebagian menjadi konsep yang mewarnai penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterbatasan produk embrional tahun 2009 tersebut adalah: masih dipandang rumit pemakaiannya; belum menyentuh konsep manajemen pengetahuan dan informasi; serta belum mengacu SPM pendidikan dasar bagi kabupaten/kota.

Apa yang direncanakan di dalam usulan kegiatan ini adalah:

- a) Survei eksploratif untuk memahami kondisi lapangan mengenai praktik manajemen pengetahuan dan informasi dalam organisasi pendidikan.
- b) Riset Pengembangan untuk menghasilkan model dan instrumen evaluasi kinerja daerah dalam pembangunan pendidikan.
- c) Riset tindakan (*social action*) berupa penguatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen pengetahuan dan informasi berbasis evaluasi kinerja, dalam konteks pembangunan pendidikan daerah.

Tiga komponen tersebut bersifat sekuensial, dan di dalam pelaksanaannya akan senantiasa melalui prosedur standar, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing tahapan. Misalnya: dalam tahap konseptualisasi senantiasa melibatkan pakar terkait, dan dalam tahap emperisasi bersifat partisipatoris, lapangan dan praktisi terlibat intensif sesuai dengan peran dalam setiap tahapan. Ada saatnya lapangan diajak menyadari

permasalahan, saat lain digali pengalaman nyata, dan saat lain lagi digali gagasan mereka sebagai pihak calon pengguna produk kegiatan.

G. Uraian tentang kebaruan

Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai sesuatu yang baru adalah sebagai berikut.

- Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan hal baru, satu langkah lebih maju dari SIM (Sistem Informasi Manajemen) maupun DSS (*Decision Support System*). Dalam skenario nasional menuju masyarakat inovatif, pengetahuan ini menduduki posisi sentral, karena tiada inovasi tanpa akumulasi pengetahuan.
- Evaluasi berbasis indikator kinerja pembangunan sektor pendidikan yang, akan dipertajam dengan dua karakteristik: a) evaluasi kinerja berorientasi pada manfaat nyata (*outcomes, impacts, results*) yang dikembangkan di dalam pendekatan *logical framework*; dan b) dikaitkan dengan SPM. SPM (Standar Pelayanan Minimal) itu sendiri dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota, baru saja diperbarui, khususnya dalam pendidikan dasar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Desentralisasi pendidikan

Dalam suatu tulisan mengenai *decentralizing Indonesia* dikemukakan bahwa seolah-olah terjadi semacam *big bang* di Indonesia. *Big bang* sebagaimana kita ketahui merupakan fenomena alam semesta yang hasilnya jutaan tahun kemudian adalah alam semesta kita dewasa ini; artinya merupakan proses awal yang diikuti dengan rangkaian proses berikutnya yang terjadi secara terus menerus. Namun metafora *big bang* dipakai untuk memahami bahwa ada kejadian yang luar biasa mengejutkan, dan biasanya dalam kondisi seperti itu terjadi keagapan dan kegamangan, karena masih silau sehingga penglihatan tidak jelas, dan ada kemungkinan orang melakukan perbuatan yang kurang tepat, salah, dan bahkan merugikan.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia diawali dengan diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa pendidikan termasuk urusan yang didesentralisasikan. Pada waktu itu UU tentang pendidikan nasional yang berlaku juga masih UU no. 2 tahun 1989; sehingga yang menjadi acuan baru satu-satunya PP turunan UU Pemerintahan Daerah yaitu PP no.25 tahun 2000. Proses dan upaya untuk menyesuaikan pranata pendidikan nasional dengan pranata pemerintahan terus dilakukan; Bappenas bersama dengan Depdikbud menugasi beberapa taskforce melakukan kajian akademik atas berbagai aspek terkait dengan kebutuhan penataan kembali pendidikan nasional. Akhirnya baru di tahun 2003 berhasil disahkan UU no. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan salah satu perubahan mendasar adalah dari sistem sentralistis menjadi sistem desentralistis. Sesuai dengan jiwa UU pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten/kota, maka penanggungjawab pendidikan daerah adalah pemerintah kabupaten/kota. Pada hal selama beberapa dekade peran kabupaten/kota bersifat teknis pelaksanaan; dan itupan ada dua instansi yakni Kandep di bawah Kanwil Depdikbud propinsi, dan Dinas pendidikan kabupaten/kota yang hanya mengurus pendidikan dasar di bawah Bupati/Walikota. Kegamangan bermunculan, apa saja urusan pusat, apa saja urusan yang didelegasikan ke kabupaten/kota yang tidak ada lagi Kandep, artinya hanya diurus oleh dinas pendidikan kabupaten/kota; peran propinsi tidak jelas. Padahal kapasitas personel dan kelembagaan lebih banyak berada

di propinsi, dan kapasitas sistem kelembagaan di kabupaten/kota masih belum memadai untuk mengemban tugas sebagai penyelenggara pendidikan di daerah.

Dalam perkembangannya kemudian UU pemerintahan daerah direvisi menjadi UU no 32 tahun 2004, setahun setelah lahirnya UU SPN; barulah peran dinas pendidikan propinsi mulai agak jelas; diperjelas dengan PP 38 tahun 2007, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dinas pendidikan kabupaten/kota. Hal ini selalu menjadi salah satu isu pokok di dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan, baik perda pendidikan tingkat propinsi maupun perda pendidikan tingkat kabupaten/kota. Dalam kegamangan itu, meskipun UUD 1945 yang sudah diamandemen mengamanatkan 20 persen anggaran negara diperuntukkan pendidikan, tidaklah sertamerta diikuti dengan perkembangan yang impresif dari pendidikan nasional.

B. Pembangunan pendidikan daerah

Persoalan pembangunan pendidikan daerah, sejalan dengan persoalan pembangunan daerah. Pada awal reformasi, banyak yang anti dengan konsep pembangunan, yang dianggap sebagai sumber kesengsaraan rakyat kecil. Sikap antipati tersebut dapat difahami karena baru saja dikecewakan dengan janji tinggal landas yang dijanjikan oleh teori pembangunan nasional ternyata tidak terbukti, bahkan justru yang terjadi adalah krisis multidimensi. Memang kajian terhadap teori Rostow yang sangat populer tentang pembangunan nasional, untuk memahami ketimpangan antar daerah, jelas sekali bahwa tidaklah mungkin semua daerah maju serentak bersama-sama dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Parr,200; Adelman, 1999). Dengan awal yang berbeda, dan dinamika perubahan yang berlainan, dapat dipahami bahwa beberapa tahun setelah penerapan teori Rostow akan diikuti dengan tingkat perkembangan antar daerah yang berbeda-beda (Nijkamp & Abreu,2007;Szajnowska, 2009)). Daerah yang lebih dulu memperoleh akses dan kesempatan akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan daerah baru belakangan mendapatkan akses kesempatan pembangunan ekonomi; belum lagi kalau ada kondisi sosial-politik yang tidak kondusif, akan menjadi kendala, dan memperlambat upaya untuk mengejar ketertinggalan.

Ilustrasi ketimpangan pembangunan daerah tersebut dapat dipakai untuk memahami ketimpangan pembangunan pendidikan antar daerah; meskipun tidak sepenuhnya mengikuti pola perubahan ekonomi. Renstra Kemendiknas 2010-2014 (2010:9-10) masih menampilkan informasi bahwa ada ketimpangan pendidikan antar wilayah. Data tahun 2008, ketimpangan pada pendidikan SD relatif tipis (2,28), akan tetapi semakin nyata pada tingkat pendidikan SMP (20,18), dan kemudian SMA/SMK (29,97) lebih nyata lagi.

Sementara itu memang ada perkembangan menarik, yakni bahwa karena kebanyakan daerah mengedepankan pendidikan sebagai prioritas pembangunan yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah, mulai disadari munculnya pusat-pusat pendidikan baru. Kalau dahulu Yogyakarta sebagai kota pendidikan, yang sulit dicari pesaingnya, dewasa ini beberapa kota lain mulai menyandang predikat juga sebagai kota pendidikan. Ambisi untuk memiliki perguruan tinggi pun sudah merambah sampai tingkat kabupaten, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada kelas di tingkat kecamatan. Namun fenomena ini nampaknya belum cukup kuat mengurangi ketimpangan pendidikan antar daerah.

Penelitian Bank Dunia (2004) menemukan bahwa memang persiapan dan kesiapan daerah kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggara pendidikan daerah dalam sistem desentralisasi, sangat minimal, kalau tidak dikatakan tidak siap. Meskipun penelitian tersebut masih lebih banyak melihat dari keberadaan perangkat administratif seperti berbagai standar pelayanan, namun cukup menggambarkan kinerja daerah pada waktu itu dalam pembangunan pendidikan.

Penelitian lain oleh Bank Dunia (2009) lima tahun berikutnya, khusus melihat dari perspektif investasi dalam pendidikan di kabupaten/kota. Penelitian ini menciptakan indek input dan indek output, untuk melihat kelihaihan manajemen pendidikan daerah, mengubah input menjadi output. Ditemukan di dalam penelitian tersebut bahwa ada ditemukan empat kategori: a) input rendah dengan output rendah, artinya tidak ada upaya; b) input tinggi dengan output tinggi, artinya wajar; c) input rendah dengan output tinggi, inilah yang patut diapresiasi; dan d) input tinggi dengan output rendah, inilah yang disayangkan. Hasil dua penelitian itu saja menggambarkan bahwa kemajuan dalam implementasi sistem desentralisasi tidak sepesat yang diharapkan.

Banyak negara berpengalaman menerapkan sistem desentralisasi, dengan latarbelakang dan tujuan yang berbeda-beda; dan tingkat keberhasilannya pun juga berbeda-beda. Ada yang menerapkan desentralisasi karena desakan daerah yang menuntut otonomi, ada yang didorong oleh kepentingan untuk mengurangi tanggungjawab pusat. Ada yang baru kelihatan hasilnya setelah beberapa tahun; ada yang meski sudah beberapa tahun hasilnya kurang jelas. Ada pula yang setelah melaksanakan sistem desentralisasi, dirasakan ada kemunduran, dan oleh karenanya untuk urusan tertentu dipandang perlu untuk dikembalikan ke sentralisasi. Negara semaju Amerika Serikat pun memiliki Pusat Testing Nasional.

Indonesia di satu sisi masih sibuk dengan euforia desentralisasi, misalnya sikap resistensi terhadap ujian nasional; namun di sisi lain ada kerinduan terhadap nyamannya guru pada waktu masih menjadi pegawai pusat. Sementara itu sistem pendanaan pendidikan yang berlaku menempatkan daerah pada posisi tidak terlalu leluasa untuk mendanai pendidikan, karena struktur pendapatan daerah masih dengan proporsi terbesar dari sumber pemerintah pusat; andil pendapatan asli daerah hanya sekitar 10 persen. Pengalokasian dan penempatan anggaran pun peran pusat masih cukup kuat, misalnya melalui DAK hanya boleh dipakai untuk kepentingan yang sudah dipastikan oleh pusat; BOS hanya boleh untuk membiayai operasional sekolah, dan dasar permintaannya berdasarkan jumlah murid, sehingga tidak banyak berarti bagi anak-anak yang karena kondisi orangtuanya belum terdaftar sebagai murid di sekolah tertentu.

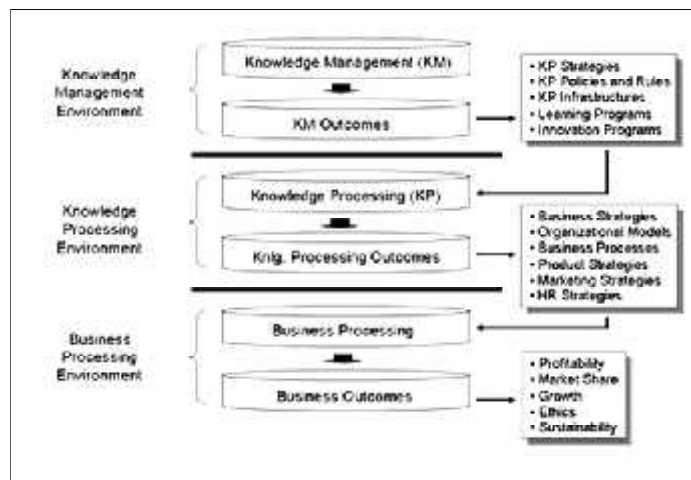
C. Manajemen berbasis pengetahuan

Sebenarnya sistem desentralisasi memberi kesempatan atau peluang daerah bahwa di dalam melaksanakan kebijakan pusat perlu disesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah masing-masing. Azas ini berlaku sampai dengan tingkat satuan pendidikan, sebagaimana terkandung di dalam makna MBS (manajemen berbasis sekolah), serta KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan). Pengamatan dan penelitian banyak dilakukan di tingkat satuan pendidikan, dan perhatian peneliti pendidikan pada persoalan pada tingkat birokrasi daerah dan nasional. Konsekuensi pendidikan sebagai bagian dari pelayanan publik masih kurang mendapatkan perhatian. Hal ini berakibat bahwa persoalan pengelolaan di berbagai jenjang birokrasi tidak banyak dikenali,

sehingga kalau kemajuan kinerja yang ditampilkan kurang memuaskan juga tidak terlalu banyak upaya yang dapat dilakukan.

Perkembangan manajemen sangat pesat, dan sebenarnya pendidikan bukan tidak pernah mencoba melakukan adaptasi atau bahkan adopsi gaya manajemen dari sektor lain. Misalnya MBO (management by objective) telah mengubah pendekatan instruksional berbasis bahan-ajar menjadi berbasis tujuan, yang belakangan formulasi tujuan menerapkan pendekatan kompetensi. Di samping itu Renstra pendidikan, termasuk rencana pengembangan sekolah, merupakan adaptasi *strategic management* yang sudah lebih dulu diterapkan di berbagai sektor.

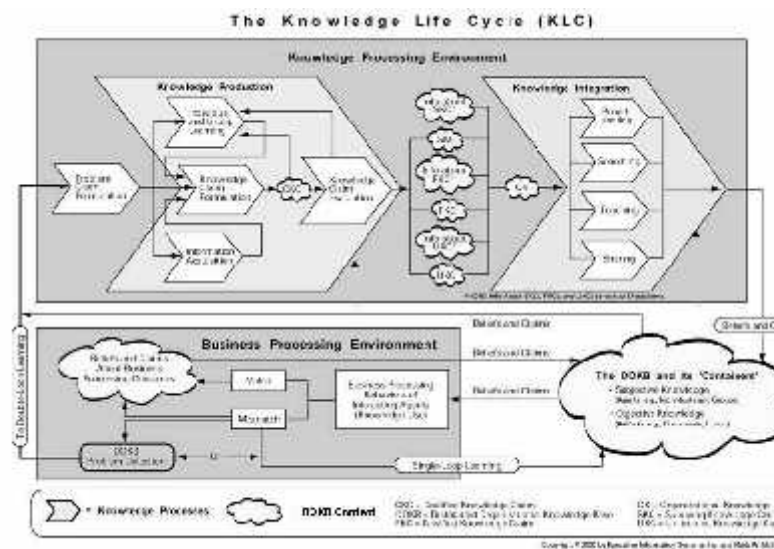
Penerapan sistem informasi manajemen dalam pendidikan, yang juga contoh lain dari instrumen manajemen yang dipakai di pendidikan, sudah lama dicoba, akan tetapi belum juga mapan (established) secara kelembagaan. Pentingnya informasi dipicu oleh tulisan futurolog A. Tofler dengan bukunya *the Power Shift*, yang menjelaskan bahwa penguasaan informasi merupakan kunci sukses di dunia yang makin kompetitif. Perkembangan manajemen kemudian menunjukkan bahwa penguasaan informasi saja belum cukup, perlu dikuasai sebagai pengetahuan (*knowledge*), karena hanya dengan pengetahuan ini dimungkinkan pembuatan keputusan lebih arif (*wise*). Berkembanglah *knowledge based economy*, dan *knowledge based society*. Cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat inovatif, menumbuhkan keniscayaan untuk menerapkan *knowledge based society*, yang artinya manajemen konvensional tidak cukup, diperlukan *knowledge based management*. (Firestone and McElroy, 2005)



Pada dasarnya di dalam manajemen berbasis pengetahuan ada tiga level lingkungan, yakni:

- a) Business processing environment
- b) Knowledge processing environment
- c) Knowledge management environment

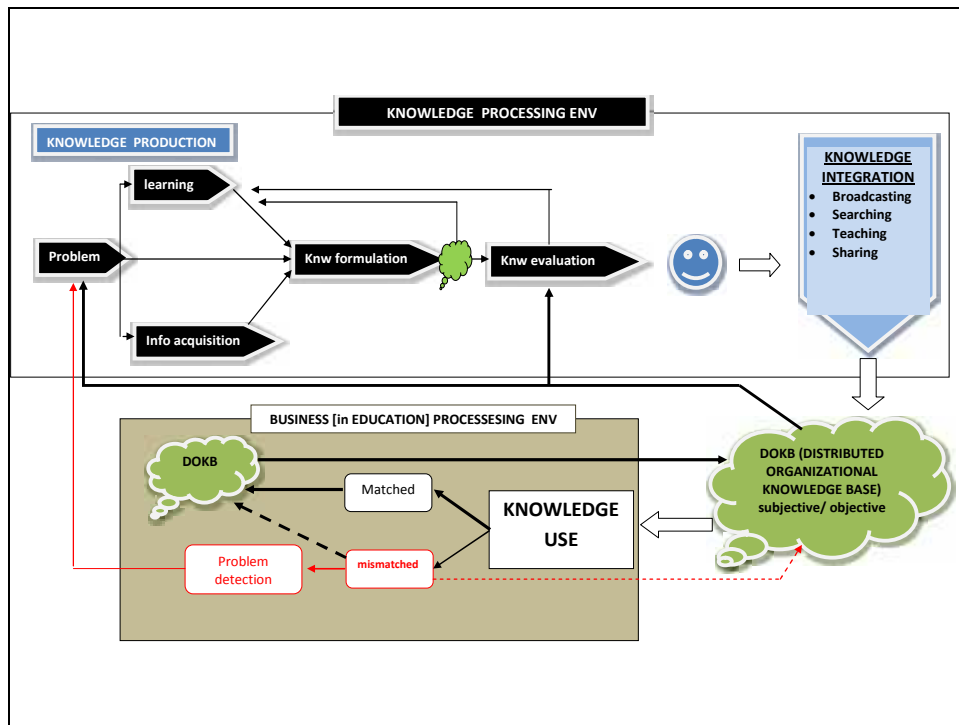
Hubungan antara business processing environment dan knowledge processing environment dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar tersebut memvisualkan posisi dan proses dihasilkannya pengetahuan baru, serta upaya untuk menerapkannya di dalam pelaksanaan fungsi pokok organisasi yang sudah menerapkan manajemen berbasis pengetahuan.

D. Kerangka pikir

Fokus penelitian ini di tahun pertama adalah melakukan asesmen untuk menemukan kinerja dinas pendidikan kabupaten/kota dari perspektif manajemen berbasis pengetahuan. Hasil dari asesmen ini akan menjadi dasar perancangan modal evaluasi berbasis kinerja dalam perspektif manajemen berbasis pengetahuan. Untuk kepentingan ini, konsep dasar manajemen berbasis pengetahuan sebagaimana tampak di kedua gambar sebelumnya, dituangkan ke dalam skema sederhana sebagai berikut.



KONSEPTUALISASI PENYIAPAN INSTRUMEN UNTUK MENDESKRIPSIKAN KINERJA PENDIDIKAN

LINGKUNGAN PROSES PENYELENGGARAAN / PENGELOLAAN LAYANAN PENDIDIKAN	LINGKUNGAN PEMROSESAN PENGETAHUAN/ INFORMASI	LINGKUNGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN/ INFORMASI
Pemanfaatan pengetahuan	MENGHASILKAN INFORMASI/ PENGETAHUAN	1. Strategi menghasilkan dan mengintegrasikan pengetahuan
Bila cocok, konsekuensi	1. Problem kebutuhan	2. Kebijakan & aturan
Bila tidak cocok, mengidentifikasi problem	2. Belajar memenuhi kebutuhan tsb	3. Infrastruktur
	3. Pengumpulan pengetahuan/ informasi	4. Program pelatihan
	4. Perumusan pengetahuan	5. Program inovasi
	5. Penilaian thd hasil perumusan	
	6. Tindak lanjut penilaian	
	↓	
	MENGINTEGRASIKAN INFORMASI/ PENGETAHUAN	
	1. Penyebaran informasi/pengetahuan	
	2. Pencarian peluang utk menerapkan pengetahuan	
	3. Pendidikan/ pelatihan	
	4. Berbagai informasi	
	↓	
	DIPEROLEHNYA PERANGKAT INFORMASI/ PENGETAHUAN BARU	

Berdasarkan gambar di atas dirancang instrumen asesmen untuk mengetahui kinerja dinas pendidikan dari perspektif manajemen berbasis pengetahuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Kerangka konseptual

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya konsep-konsep kunci dari kegiatan ini adalah:

- Manajemen berbasis pengetahuan dan informasi (MPI); di mana produksi informasi, pengolahan dan pengintegrasian pengetahuan ke dalam proses pembangunan pendidikan, dikelola secara profesional (Firestone & McElroy,2005).
- Evaluasi kinerja pembangunan pendidikan daerah dengan pendekatan *logical framework* yang menaruh perhatian besar atas manfaat nyata (*outcomes*) (Valades & Bamberger).
- Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pendidikan daerah dengan pendekatan transformasional dengan sedikit transaksional bila dipandang perlu, agar mampu melakukan evaluasi diri kinerja, yang terintegrasi dengan siklus manajemen pengetahuan dan informasi.

Kerangka kerja

Konsep-konsep kunci tersebut pada kerangka konseptual dijabarkan ke dalam beberapa rangkaian kegiatan berikut.

- **Survei dan pendalaman proses Manajemen Pengetahuan dan Informasi (MPI) di DIY (1 kota dan 4 kabupaten)**
 - Penyiapan instrumen survei MPI
 - Pelaksanaan survei MPI
 - Pendalaman kasus purposif untuk daerah yang ditemukan menonjol karena keberhasilannya atau kegagalannya dalam MPI
 - Analisis pemetaan proses-proses kunci dalam MPI misalnya:
 - bagaimana proses produksi informasi;
 - bagaimana proses pengolahan dan pengintegrasian pengetahuan ke dalam proses-proses pembangunan pendidikan; di balik itu semua perlu dipetakan
 - bagaimana proses perencanaan – pelaksanaan – pengendalian MPI

- **Publikasi temuan MPI dalam pendidikan**
- **Pengembangan model evaluasi kinerja (EKP) di DIY (1 kota dan 4 kabupaten)**
 - Konseptualisasi model evaluasi kinerja pendidikan
 - Sasaran evaluasi: Produk 2009 dikombinasikan dengan ketentuan SPM pendidikan daerah.
 - Instrumentasi evaluasi: penekanan pada prinsip “evaluasi berbasis bukti, tak hanya opini”; dapat dilakukan sendiri oleh praktisi; dan yang sangat penting adalah mampu menghasilkan informasi strategis dan bermakna untuk ditindaklanjuti.
 - Ujicoba lapangan atas model dan instrumen evaluasi kinerja program/kebijakan pendidikan daerah
 - Reviu dan penyempurnaan model prototip EKP
 - Pengemasan akhir pedoman EKP
 - **Publikasi EKP yang fungsional untuk kepentingan MPI**
- **Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi pendidikan (PKOP) di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo.**
 - Pendekatan kelompok sasaran PKOP
 - Pemotretan dan analisis kondisi awal EKP-MPI (evaluasi kinerja pendidikan terintegrasi dengan manajemen pengetahuan dan informasi)
 - Rangkaian lokakarya transformasional untuk memperkenalkan, mencoba penerapan EKP-MPI untuk meningkatkan kinerja pendidikan.
 - Pelembagaan EKP-MPI
 - **Publikasi rintisan EKP-MPI**
- **Pengemasan dan publikasi yang utuh** dari potret MPI, pengembangan model EKP-MPI, sampai dengan pengalaman penguatan kapasitas kelembagaan dalam EKP-MPI.

B. Jenis penelitian tahun – I

Pada tahun pertama ini yang dilakukan adalah survei asesmen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja dinas pendidikan kabupaten/kota dari perspektif manajemen berbasis pengetahuan/informasi.

C. Subjek penelitian

Oleh karena yang diases adalah dinas pendidikan, maka subjek sekaligus sebagai responden di dalam asesmen ini adalah pejabat di jajaran dinas pendidikan kabupaten/kota, yakni: kepala dinas dan semua kepala bidang, serta sekretariat.

D. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Angket

Angket ini merupakan kombinasi pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka. Setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban berupa skala berperingkat 0 – 5; dan setiap kluster atau rumpun pertanyaan tertutup tersebut disediakan ruang terbuka untuk menuangkan keterangan naratif sebagai komplementasi atas jawaban tertutup.

2. FGD dan atau wawancara

Diskusi/wawancara ini dilakukan di masing-masing dinas dengan tujuan: saling memberikan klarifikasi. Tim peneliti menjelaskan maksud penelitian dan instrumentasi yang dipergunakan; sedangkan dari pihak dinas memberikan penjelasan klarifikasi dan atau tambahan keterangan atas apa saja yang sudah dituliskan di dalam angket. Di samping sesuai pula dengan makna asesmen, di mana ada aspek pengumpulan informasi, dan aspek penggunaan informasi sebagai feedback atau tindak lanjut, maka di dalam diskusi disisipkan pula pandangan pandangan peneliti atas kondisi yang terjadi di lingkungan dinas pendidikan.

E. Analisis data

Analisis data terdiri atas:

1. Analisis statistik deskriptif dengan visualisasi grafis dilakukan atas data dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tertutup.
2. Analisis kualitatif, berupa penataan dan pemaknaan atas data naratif kualitatif baik yang diperoleh dari jawaban tertulis terbuka, maupun notulen dari FGD/wawancara.

3. PUSTAKA ACUAN

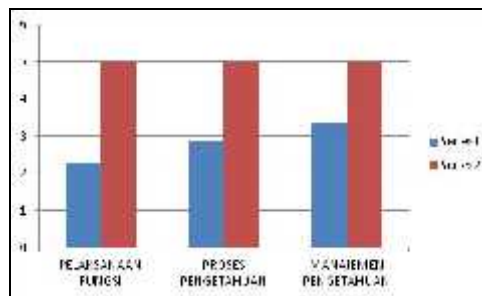
- Anik Gufron, Sumarno, dan Heru Kuswanto (2009). Implementai standar pelayanan minimal pendidikan sekolah di DIY. Laporan Penelitian Pengembangan Daerah. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY
- Firestone,J.M. and McElroy,M.W.(2005).Doing knowledge management. *The Learning Organization journal*, vol.12,no.2. diunduh dar <http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09696470510583557>.
- Valadez,J.& Bamberger,M. (1994). Monitoring and evaluating social programs in developing countries. EDI – World Bank
- Sukardi dkk (2007). Evluasi efikasi pelaksanaan program perluasan dan pemerataan pendidikan dasar. Ditjen Mandikdasmen kerjasama dg Lembaga Penelitian UNY.
- Sumarno (2004). Asesmen kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY
- Sumarno dan Hiryanto (2009). Pengembangan model evaluasi kinerja pendidikan daerah. Laporan Penelitian Strategis Nasional. Yogyakarta: Lemlit UNY
- Sumarno dkk (2008). Kemampuan daerah dalam implementasi pembangunan pendidikan dasar. Ditjen Mandikdasmen kerjasama dg Lemlit UNY.
- The World Bank (2004) Education in Indonesia: managing the transition to decentralization.
- The World Bank (2009). Investing in Indonesia's education at the district level.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. AGREGASI LINTAS KABUPATEN/KOTA D.I.Y.

Survei ini pada dasarnya mengidentifikasi tiga level lingkungan yakni: lingkungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, lingkungan pemrosesan pengetahuan, dan lingkungan manajemen pengetahuan. Data agregasi lintas kabupaten/kota menunjukkan bahwa dari skor maksimal 5, seberapa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pemerintahan dalam bidang pendidikan baru mencapai 2,28; separoh dari kondisi ideal. Sementara itu pemrosesan pengetahuan di lingkungan Dinas Pendidikan baru mencapai 2,87; masih juga pada kondisi kurang karena skor maksimum 5; adapun dalam hal manajemen pengetahuan di lingkungan Dinas Pendidikan juga baru 3,34 atau pada posisi cukup karena skor maksimum juga 5.



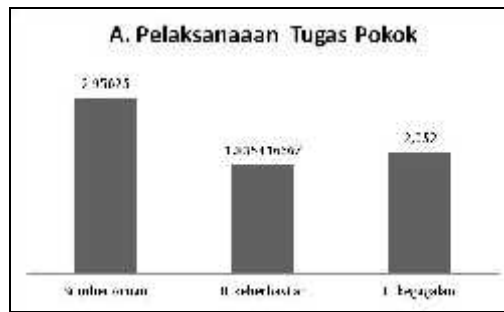
Gambar 4.1. Profil 3 level lingkungan MBP

Menurut konsep yang dikembangkan di dalam penelitian ini, lingkungan rutin, pemrosesan pengetahuan, dan manajemen pengetahuan itu berurutan; artinya minimum fungsi dan peran dilaksanakan dengan baik; dan level lingkungan yang lebih tinggi dapat lebih rendah. Temuan yang menunjukkan bahwa pemrosesan pengetahuan dan manajemen pengetahuan sudah terjadi meskipun masih pada kondisi cukup atau bahkan kurang, ada dua kemungkinan: a) jawaban merupakan persepsi kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya; atau b) fungsi pemrosesan pengetahuan dan manajemen pengetahuan memang sudah terjadi, namun belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan daerah.

Pendalaman pada masing-masing dari ketiga level lingkungan diperoleh temuan sebagai berikut.

1. Lingkungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

Ada tiga aspek yang dilihat dan semua di bawah 3,0, artinya belum pada posisi cukup.

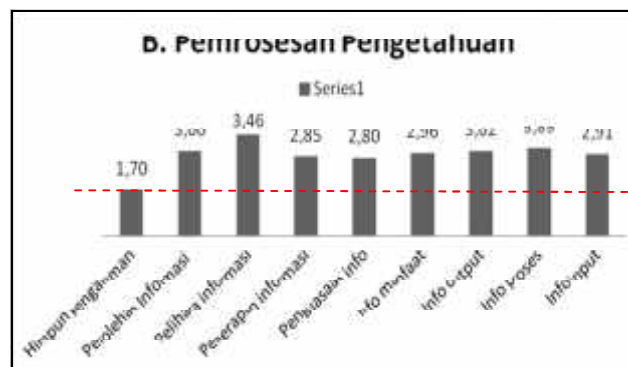


Gambar 4.2. Lingkungan pelaksanaan tupoksi DIY

Sumber acuan pelaksanaan tugas sudah pada kondisi cukup, mengedepankan kepatuhan pada SOP, agak kurang peduli bahwa yang terjadi rutinitas, serta pemanfaatan data/informasi bahkan pengetahuan dilaporkan pada kondisi cukup. Dalam hal belajar dari keberhasilan dan juga dari kasus kegagalan masih dalam posisi kurang. Hal ini berarti bahwa secara kelembagaan, masih kurang kapabel untuk belajar dari pengalaman.

2. Lingkungan pemrosesan pengetahuan

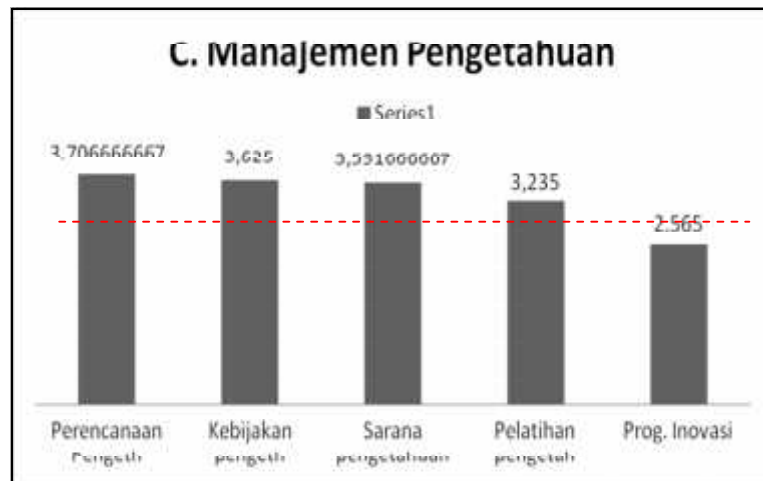
Lingkungan pemrosesan pengetahuan yang mencakup menghasilkan dan mengintegrasikan pengetahuan ke dalam pelaksanaan tugas pokok, masih pada posisi cukup atau sekitar 3,0 dari skala 5. Bahkan untuk fungsi menghimpun pengetahuan masih pada posisi “kurang” (1,7); demikian pula pengetahuan tentang indikator kinerja manfaat belum sampai pada angka cukup, artinya belum hidup konsep efikasi bahwa program berhasil menyelesaikan masalah. Satu-satunya yang lebih dari cukup adalah fungsi pemeliharaan informasi (3,46) akan tetapi tidak pada pemanfaatan informasi (2,8)



Gambar 4.3. Lingkungan proses pengetahuan -DIY

3. Lingkungan manajemen pengetahuan

Kondisi pada lingkungan ketiga ini yang nampaknya lebih diwarnai oleh persepsi mengenai kondisi yang diharapkan atau kondisi yang seharusnya.



Gambar 4.4. lingkungan manajemen pengetahuan - DIY

Hal ini ditandai dengan meskipun dilaporkan bahwa fungsi-fungsi perencanaan pengetahuan, dibuatnya kebijakan mengenai pengetahuan, pengadaan sarana, bahkan pelatihan; nyatanya belum sampai dengan dilahirkannya berbagai program inovatif yang baru mencapai angka 2,5 dari skala 5. Kalau benar bahwa telah hidup fungsi manajemen pengetahuan yang efektif tentu diikuti dengan lahirnya program-program inovatif. Sering dikatakan bahwa sebenarnya ada ide inovasi, akan tetapi terkendala oleh pendanaan, artinya belum mampu menghasilkan pemikiran program inovatif itu berikut dengan bagaimana pendanaannya.

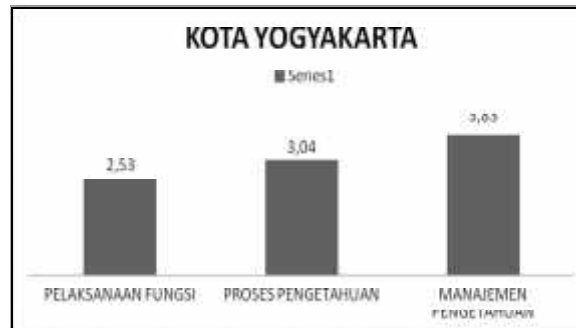
B. AGREGASI PER KABUPATEN/KOTA

Setelah disajikan temuan lintas dinas pendidikan kabupaten/kota, di dalam bagian berikut disajikan profil dari masing-masing kabupaten/ kota di D.I.Y.

1. Kota Yogyakarta

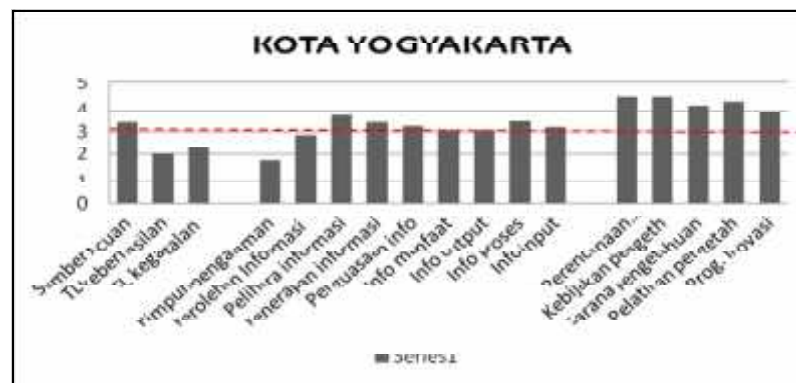
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menampilkan data yang sejalan dengan temuan agregatif lintas kabupaten/kota, dimana fungsi pelaksanaan tugas rutin dirasa masih

kurang (2,5); meskipun demikian dalam hal pemrosesan pengetahuan dilaporkan cukup (3,04), dan manajemen pengetahuan dilaporkan nyaris baik (3,83); semua dalam skala maksimum 5.



Gambar 4.5. Profil MBP total – Kota Yogyakarta

Namun Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa ada beberapa program inovatif misalnya: pendaftaran siswa baru dengan sistem *online*, ada BOSDA yang menjadi dasar pelarangan sekolah untuk menarik biaya, ada program afirmasi untuk anak-anak dari keluarga miskin (Jaminan Pendidikan Daerah, kuota 20% meskipun belakangan menimbulkan masalah lain.

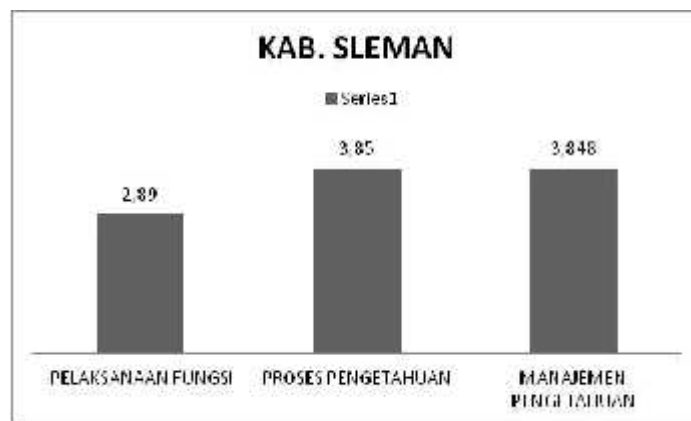


Gambar 4.6. Profil MBP rinci – Kota Yogyakarta

Grafik yg lebih rinci tersebut menampilkan bahwa: satu dari tiga indikator unsur A (pelaksanaan tugas pokok) pada kondisi cukup; pada komponen B (pemrosesan pengetahuan) tujuh dari sembilan unsur berada pada kondisi cukup; sedangkan dari lima unsur C (manajemen pengetahuan) hampr semua sudah dalam posisi baik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa di wilayah kota ini memang muncul program-program teobosan.

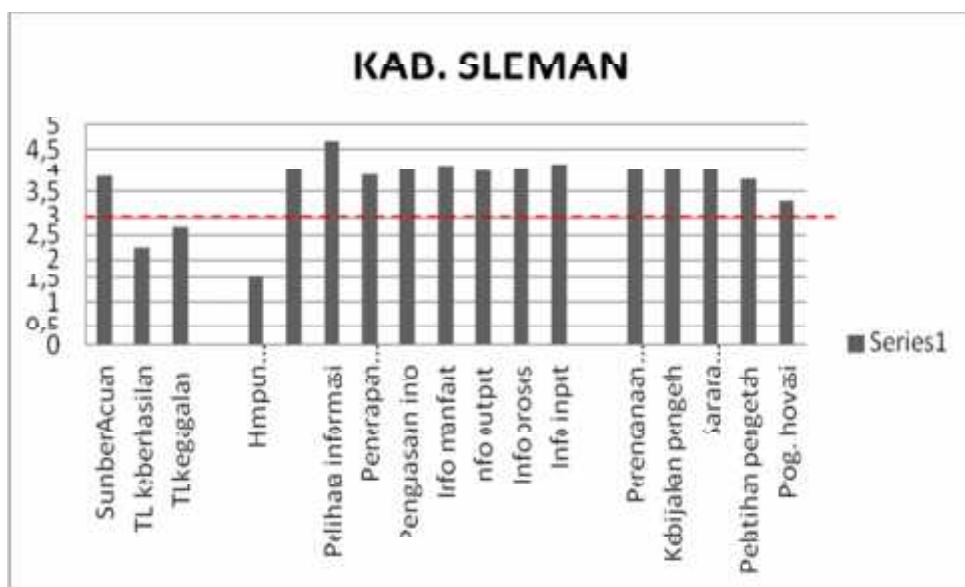
2. Kabupaten Sleman

Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara global nampak sangat percaya diri untuk mengatakan bahwa dalam hal pemrosesan pengetahuan (B) dan manajemen pengetahuan (C) sudah pada posisi cukup baik (3,8) dari skala 5; akan tetapi dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (A) masih belum mencapai kondisi cukup (2,89). Seharusnya kalau memang fungsi B dan apalagi C bagus, tentunya fungsi A akan baik pula.



Gambar 4.7. Profil MBP total – Kabupaten Sleman

Adapun gambaran lebih rinci dapat diperhatikan pada grafik berikut.



Gambar 4.8. Profil MBP rinci – Kabupaten Sleman

Garis putus-putus merupakan batas “cukup (3,0). Satu indikator dari fungsi A hampir baik, akan tetapi di aspek yang lain masih di bawah cukup; artinya dalam hal menindaklanjuti pengalaman positif dan atau negatif di dalam pelaksanaan tugas pokok, masih bagus. Sementara itu hanya satu dari sembilan aspek B yang masih dalam kondisi kurang yaitu dalam hal menghimpun pengetahuan; akan tetapi dilaporkan bahwa sudah cukup baik. Sleman juga sangat percaya bahwa dalam hal manajemen pengetahuan sudah baik, meskipun tidak dapat ditunjukkan bahwa sudah menghasilkan program-program inovatif. Di dalam FGD dilaporkan bahwa ide baru seringkali terkendala oleh keterbatasan pembiayaan program.

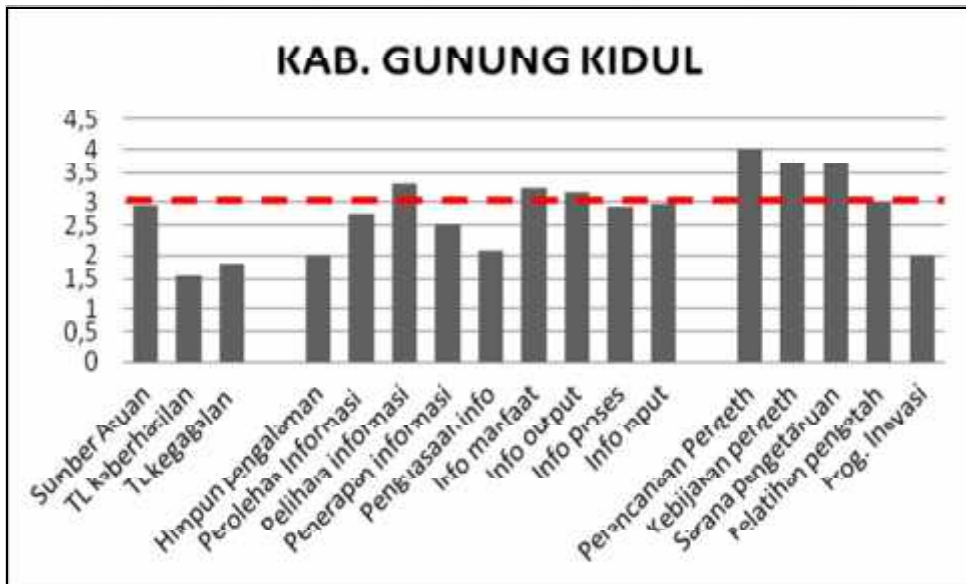
3. Kabupaten Gunung Kidul

Profil global Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (A) masih dalam posisi kurang (2,1); sementara itu dalam hal pemrosesan pengetahuan (B) masih belum mencapai cukup (2,7); akan tetapi dalam hal manajemen pengetahuan (C) sudah cukup baik (3,6). Ungkapannya mirip bahwa meskipun ada ide sering terkendala oleh kemampuan pendanaan.



Gambar 4.9. Profil MBP total – Kabupaten Gunung-Kidul

Gambaran lebih rinci dapat diperhatikan di grafik berikut.



Gambar 4.10. Profil MBP rinci – Kabupaten Gunung-Kidul

Nampak di dalam grafik tersebut bahwa semua unsur A masih di bawah garis cukup, hanya sumber acuan kegiatan yang sudah mendekati cukup. Sedangkan pada rumpun B, tiga dari sembilan unsur sudah pada kondisi cukup, yakni pemeliharaan informasi, dan mereka sudah berusaha memiliki indikator dampak dan hasil dari setiap program yang dilaksanakan. Pada komponen manajemen pengetahuan, empat aspek sudah pada posisi cukup, akan tetapi masih kurang melahirkan program-program inovatif.

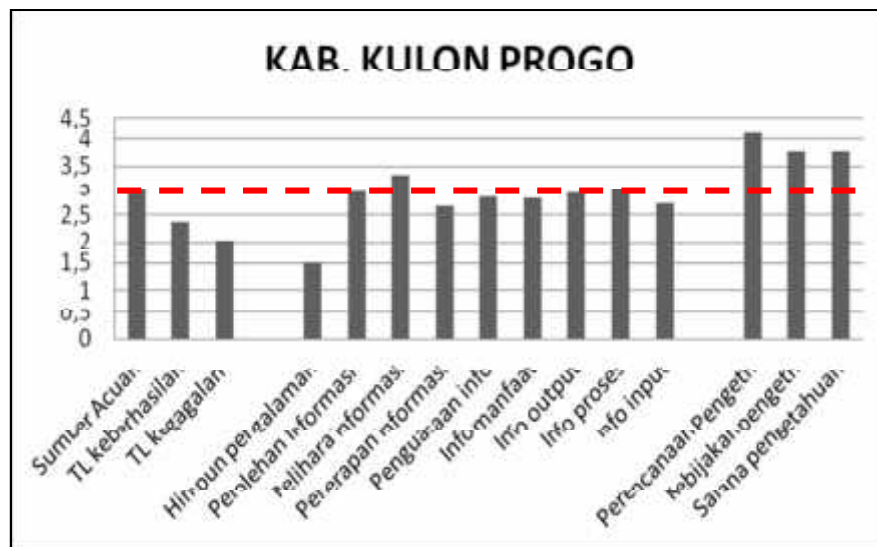
4. Kabupaten Kulon Progo

Profil Kabupaten Kulon Progo berbeda dengan kabupaten lain, nampaknya lebih objektif. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (A) memang masih belum mencapai posisi cukup; demikian pula dalam pemrosesan pengetahuan (B); dan lebih rendah lagi adalah dalam hal manajemen pengetahuan yang pada posisi kurang (1,3).



Gambar 4.11. Profil MBP total – Kabupaten Kulon-Progo

Gambaran lebih rinci dapat dicermati di dalam grafik berikut.

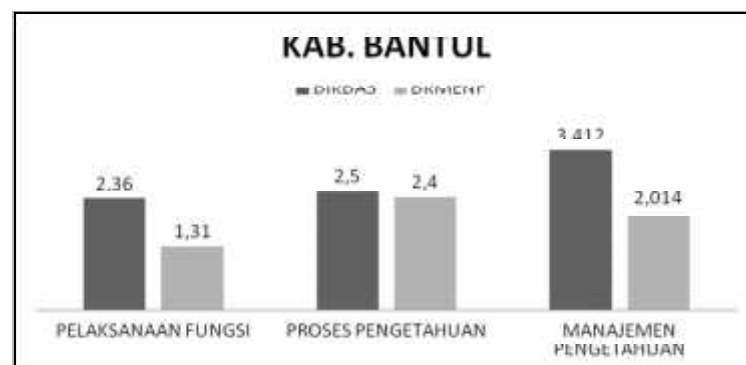


Gambar 4.12. Profil MBP rinci – Kabupaten Kulon-Progo

Semua unsur A masih kurang kecuali sumber acuan yang sudah cukup. Pada lingkungan B, pemrosesan pengetahuan, hampir mendekati cukup, kecuali fungsi pengumpulan pengalaman yang masih kurang; sehingga kalau fungsi lain dari pemrosesan pengetahuan sudah mendekati cukup, hanya terhadap himpunan pengetahuan yang belum terlalu banyak.

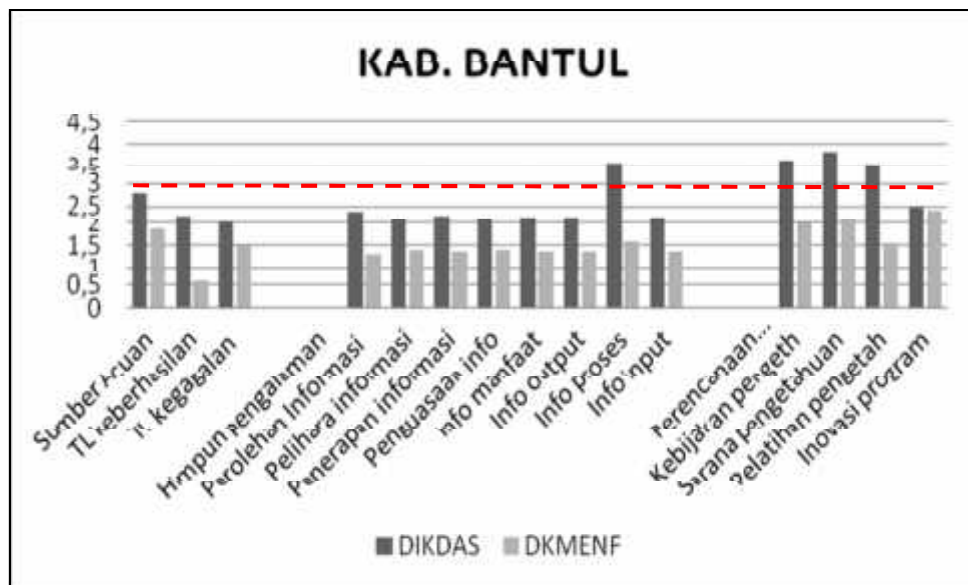
5. Kabupaten Bantul

Khusus Kabupaten Bantul ada dua dinas, yaitu Dinas Pendidikan Dasar; dan Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal . Grafik berikut menunjukkan bahwa lingkungan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (A), pemrosesan pengetahuan (B), dan manajemen pengetahuan (C) pada umumnya masih pada posisi kurang; kecuali fungsi manajemen pengetahuan pada Dinas Dikdas.



Gambar 4.13. Profil MBP total – Kabupaten Bantul

Profil yang lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



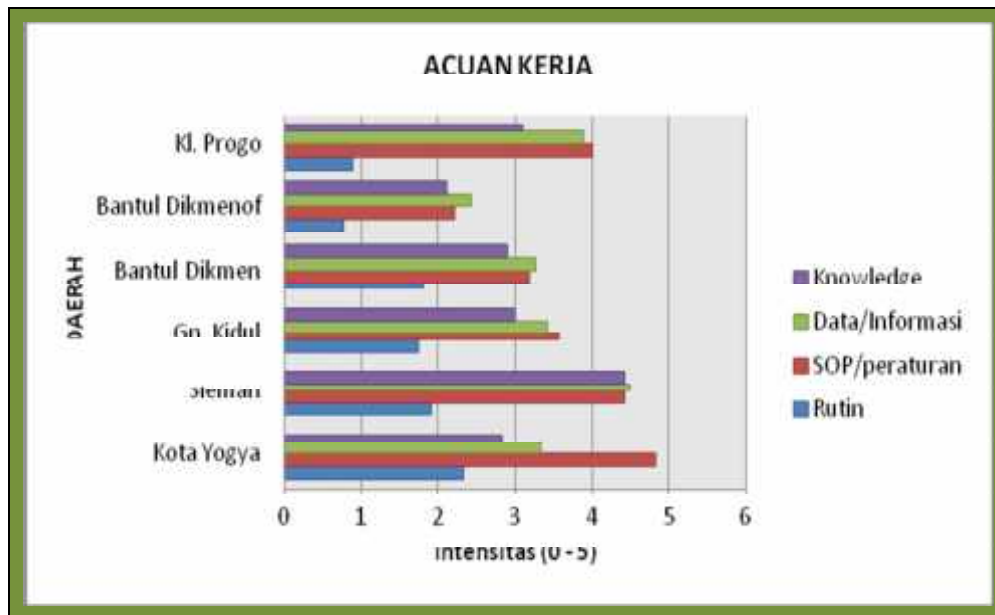
Gambar 4.14. Profil MBP rinci – Kabupaten Bantul

Secara konsisten profil Dinas Dikdas dilaporkan lebih baik dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Menengah dan nonformal. Di dalam pelaksanaana tugas pokok, yang sudah mendekati cukup adalah sumber acuan di pendidikan dasar. Tindak lanjut dari setiap ada kasus keberhasilan maupun kegagalan kurang dilakukan dengan baik. Dalam hal lingkungan pemrosesan pengetahuan, satu-satunya yang menonjol dari sembilan aspek hanyalah ketersediaan indikator proses pada pendidikan dasar; aspek lain masih dalam kondisi kurang. Di dalam manajemen pengetahaunpun yang dilaporkan lebih baik adalah pendidikan dasar; kecuali dalam hal keinovasian, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dan nonformal, sama-sama dalam posisi kurang.

C. ANALISIS ANTAR DAERAH

C.1. LINGKUNGAN LEVEL PERTAMA: Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Ada tiga aspek yang dilihat dalam kaitannya dengan lingkungan level satu, yakni pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rutin dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, yaitu: a) acuan kerja; dan b) apa yang biasanya dilakukan setiap kali ada kasus sukses, serta c) tindak lanjut yang biasanya dilakukan setiap kali ada kasus kegagalan.



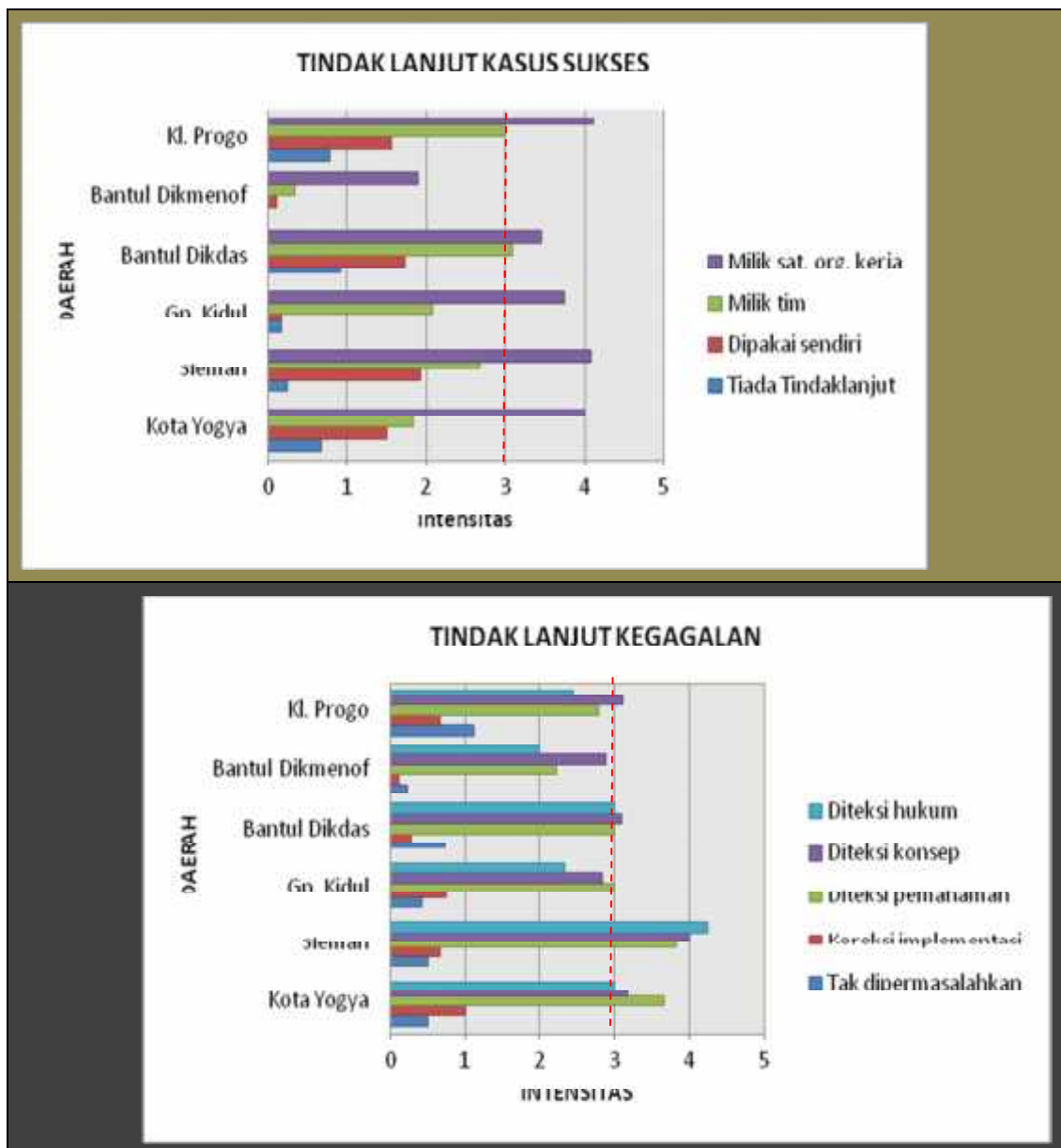
Gambar 4.15. Acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi

Berdasarkan temuan yang ditampilkan di gambar tersebut ada beberapa catatan penting.

- Kepatuhan Dinas Pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku pada umumnya cukup kuat, apalagi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kepatuhan memang suatu keniscayaan, namun di dalam sistem desentralisasi peraturan dari pemerintah pusat seharusnya tidak menutup peluang bagi daerah untuk kreatif dan inovatif, mengakomodasi karakteristik masing-masing daerah.
- Data dan informasi juga menjadi acuan kedua terpenting, baru disusul dengan pengetahuan pada urutan ke-tiga. Sebagai konsekuensi dari kondisi ini adalah bahwa kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas data, pengetahuan, dan kearifan di dalam mempertimbangkannya. Kalau ada kesan bahwa kemajuan pendidikan tidak

terlalu jelas, maka perlu dilacak ke tiga hal tersebut; akurasi data, kualitas pengetahuan, dan kearifan di dalam menggunakannya sebagai bahan pertimbangan di dalam pembuatan keputusan. Rendahnya rutinitas menggambarkan banyaknya urusan nonrutin yang dihadapi dinas pendidikan; dan untuk urusan rutin mengandalkan pada kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku.

Terhadap urusan rutin memang relatif lebih mudah, dibandingkan dengan menghadapi urusan non-rutin yang tentu saja ada peluang berhasil dan ada peluang gagal.



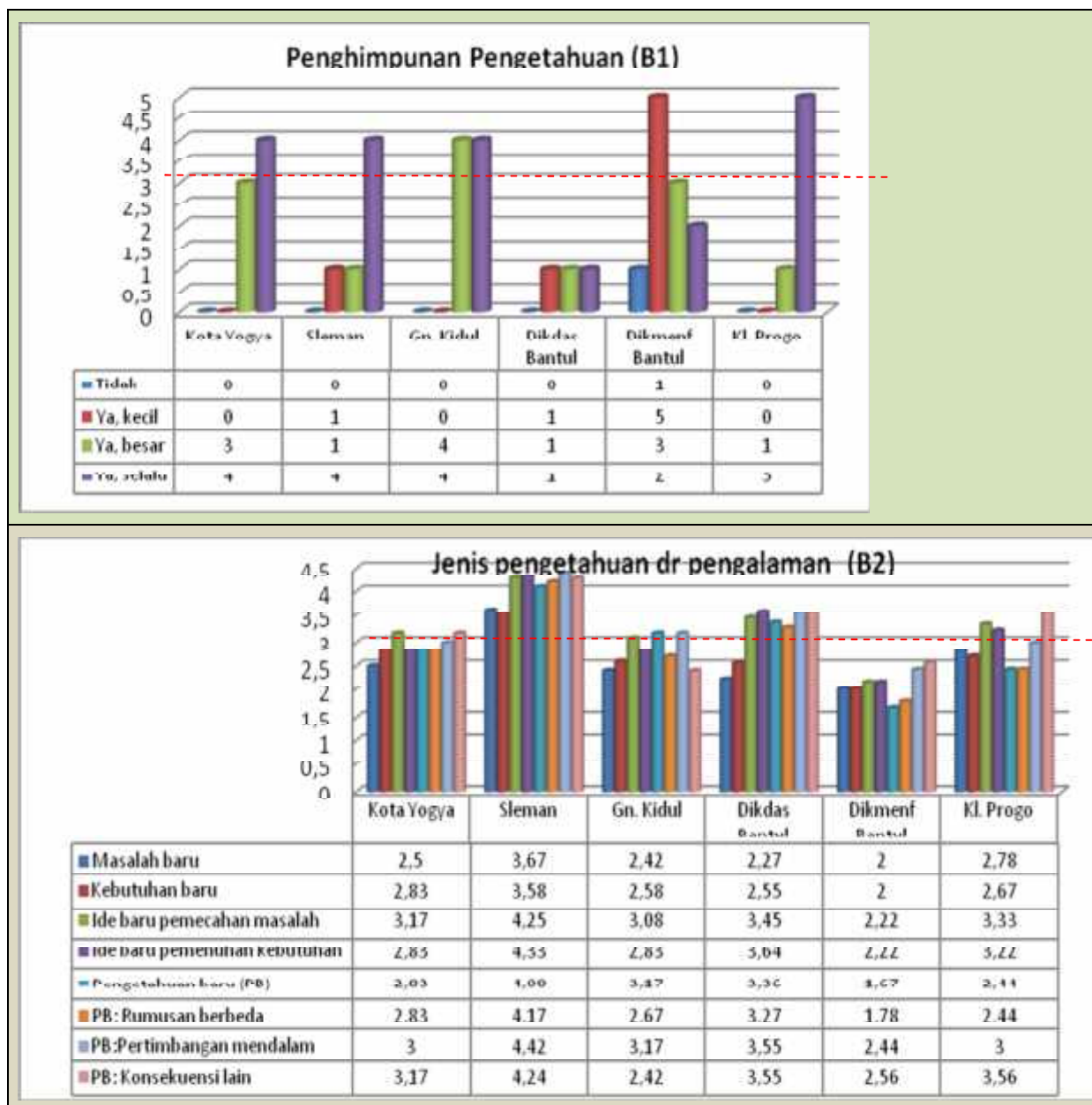
Gambar 4.16. Tindak lanjut dari setiap keberhasilan dan kegagalan

Gagal atau berhasil, paling tidak secara relatif, pasti pernah dialami oleh dinas; dan gambar tersebut menampilkan temuan apa yang dilakukan dinas terkait dengan kenyataan bahwa pasti ada pengalaman yang berharga dari setiap peristiwa. Beberapa temuan menarik dari gambar tersebut dapat dikemukakan bahwa baik kegagalan maupun keberhasilan cenderung untuk ditindaklanjuti, tercermin dari sedikitnya yang menjawab tidak ditindaklanjuti. Adapaun tindaklanjut yang dilakukan dari perspektif pengelolaan pengetahuan di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berhasil cenderung tidak hanya dimiliki sendiri maupun oleh tim yang terlibat langsung, namun masih lebih banyak pengetahuan yang berasal dari pengalaman sukses tersebut menjadi milik bersama di unit kerja. Memang tidak semua *dishare*, memang ada sebagian kecil yang cenderung dimiliki sendiri oleh pelaku atau yang langsung mengalami, dan ada pula yang dimiliki bersama hanya di antara tim yang terlibat. Di antara dinas pendidikan kabupaten yang ada Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Bantul melaporkan relatif rendahnya tindaklanjut dibandingkan dengan daerah lain.
- b. Terhadap kasus kegagalan ada dua bentuk tindaklanjut yang relatif jarang dilakukan yakni tidak ada tindakan sama sekali, dan ada tindakan koreksi. Sementara itu tiga tindakan yang lain adalah melakukan deteksi kalau-kalau ada kesalahan pemahaman, atau kesalahan konsep, atau ada masalah hukum. Dalam hal menghadapi kegagalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menampilkan data paling tinggi di antara daerah yang lain, termasuk melakukan deteksi bila ada pelanggaran hukum; kedua pada level cukup intens adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Deteksi kemungkinan terjadinya pemahaman yang salah dilakukan dengan cukup intens di semua daerah.

C.2. LINGKUNGAN LEVEL DUA: pemrosesan pengetahuan

Di dalam penelitian ini dipakai sembilan komponen dari pemrosesan pengetahuan, yang disajikan ke dalam empat kelompok: a) aktivitas penghimpunan pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan yang terkumpul (Gambar....); b) aktivitas pemeliharaan, penerapan, dan penyebaran penguasaan pengetahuan (Gambar....); di sambung dengan informasi mengenai indikator kinerja yang menjadi tuntutan dalam manajemen pelayanan publik: c) indikator kinerja dampak dan hasil program (Gambar....); d) indikator kinerja proses dan input program (Gambar....).



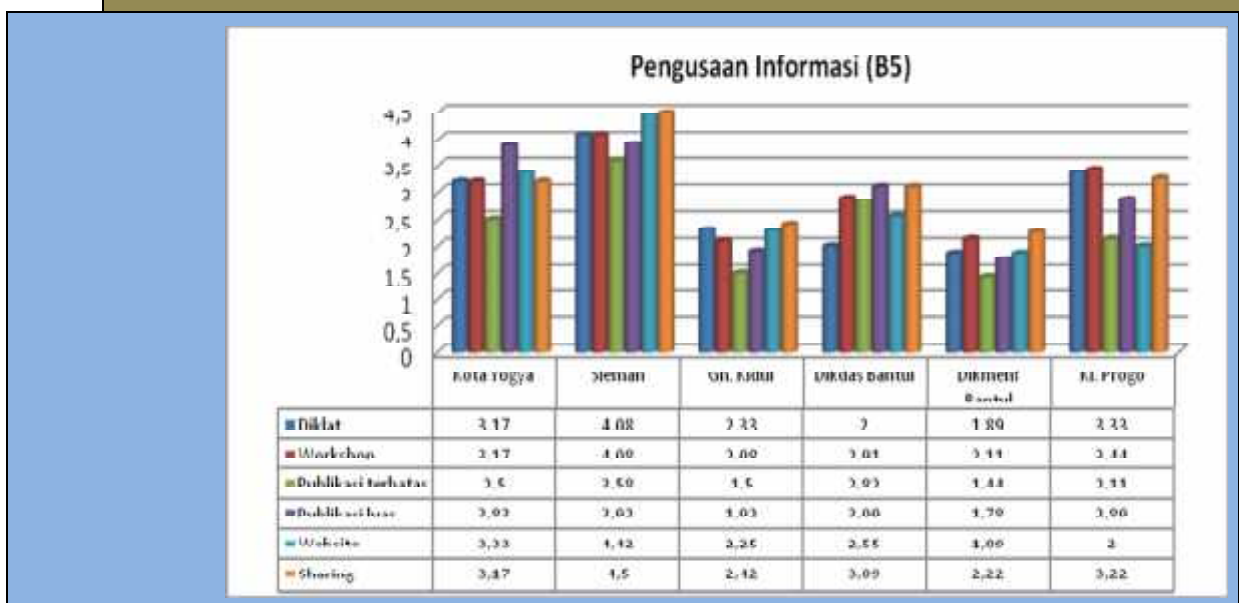
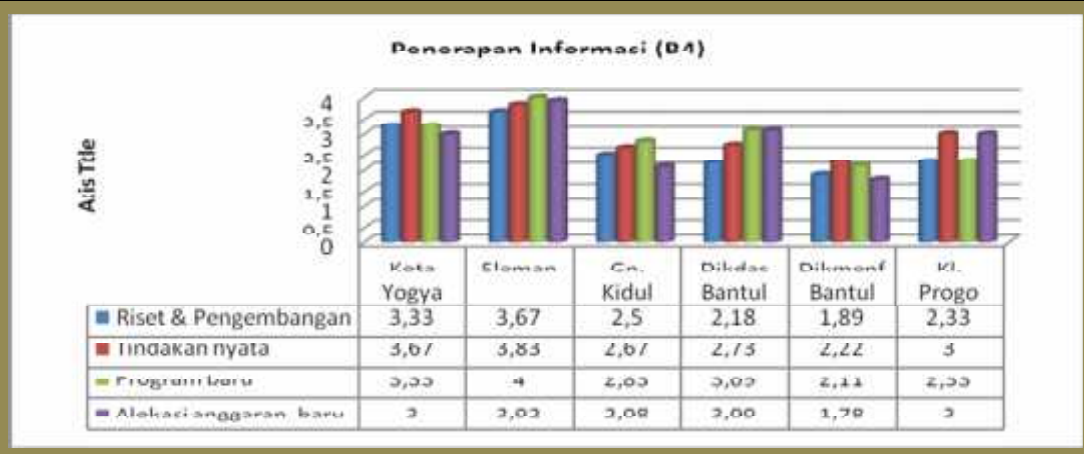
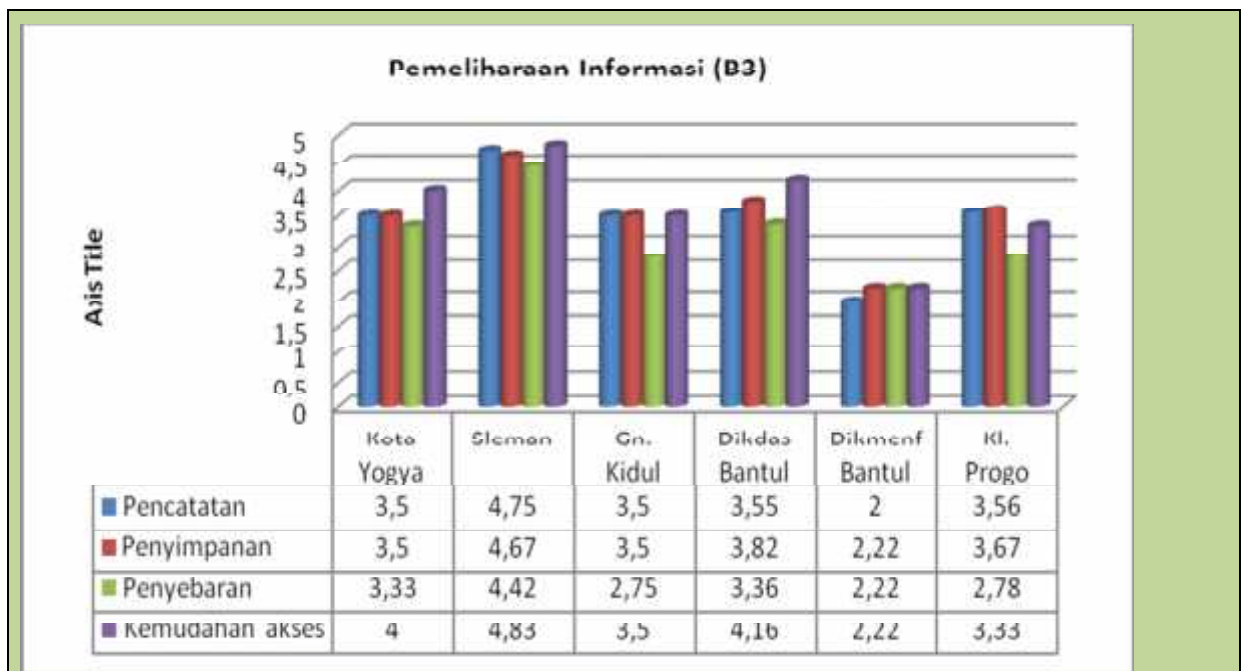
Gambar 4.17. penghimpunan pengetahuan dan jenis pengetahuan terkumpul

Organisasi yang sadar pengetahuan pastilah belajar dari pengalaman, karena pengalaman sebagai sumber tak pernah kering memberikan banyak pengetahuan. Dari perspektif ini perlu dilihat seberapa terjadi aktivitas belajar dari pengalaman, jawaban terentang dari pilihan “tidak” sama sekali, “kecil” atau sedikit belajar, “besar” atau banyak belajar, dan “selalu” artinya sangat intensif belajar dari pengalaman. Rata-rata dinas pendidikan menyatakan bahwa aktivitas belajar dari pengalaman itu “besar” dan “selalu”, kecuali Bantul yang tidak terlalu intensif belajar dari pengalaman, separoh responden dari dinas pendidikan menengah menyatakan aktivitas pengimpunan pengetahuan itu kecil.

Aspek berikutnya yang dilihat adalah jenis pengetahuan apa saja yang terhimpun dari pengalaman dan seberapa intensitas masing-masing. Ada delapan jenis pengetahuan/informasi yang dapat diperoleh dari pengalaman: 1) masalah baru; 2) kebutuhan baru; 3) ide baru pemecahan masalah; 4) ide baru cara pemenuhan kebutuhan; 5) pengetahuan baru (PB) sama sekali; 6) formulasi lain dari PB; 7) PB sebagai dasar pertimbangan yang lebih mendalam dalam pembuatan keputusan; dan 8) PB memberikan informasi mengenai konsekuensi lain yang tak terpikirkan sebelumnya.

Dari ke-delapan jenis pengetahuan tersebut yang paling menonjol adalah no. 3 dan 4; pengalaman memunculkan ide baru cara pemecahan masalah dan atau cara pemenuhan kebutuhan; serta no. 7 dan 8; pengetahuan baru sebagai dasar pertimbangan di dalam pembuatan keputusan yang lebih mendalam, dan disadarinya ada konsekuensi lain yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kalau diperhatikan antar daerah, nampak yang paling intensif adalah Sleman. Di Bantul, Dinas Dikdas cukup intensif, meskipun selektif; kontras dengan Dinas Dikmenof yang kurang intensif; hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan sebagai upaya menindaklanjuti pengalaman yang juga rendah.

Bagian berikut menggambarkan apa yang dilakukan oleh dinas, atau apa yang terjadi dengan pengetahuan dan informasi yang telah terhimpun sebagai aset kelembagaan. Ada tiga hal yang dilihat: pertama, bagaimanakah penyimpanan atau pemeliharaan informasi, dari pencatatan sampai dengan aksesibilitas; kedua, bagaimanakah upaya pendayagunaan pengetahuan yang telah terkumpul, misalnya untuk dasar perintisan sampai dengan dasar pengalokasian anggaran; dan ketiga, bagaimanakah upaya organisasi dinas dalam kaitannya dengan kebutuhan bahwa pengetahuan dan informasi perlu dikuasai oleh segenap unsur di dalam organisasi dinas pendidikan, lewat berbagai kegiatan dan atau media komunikasi.



Gambar 4.18. Pemrosesan pengetahuan -1

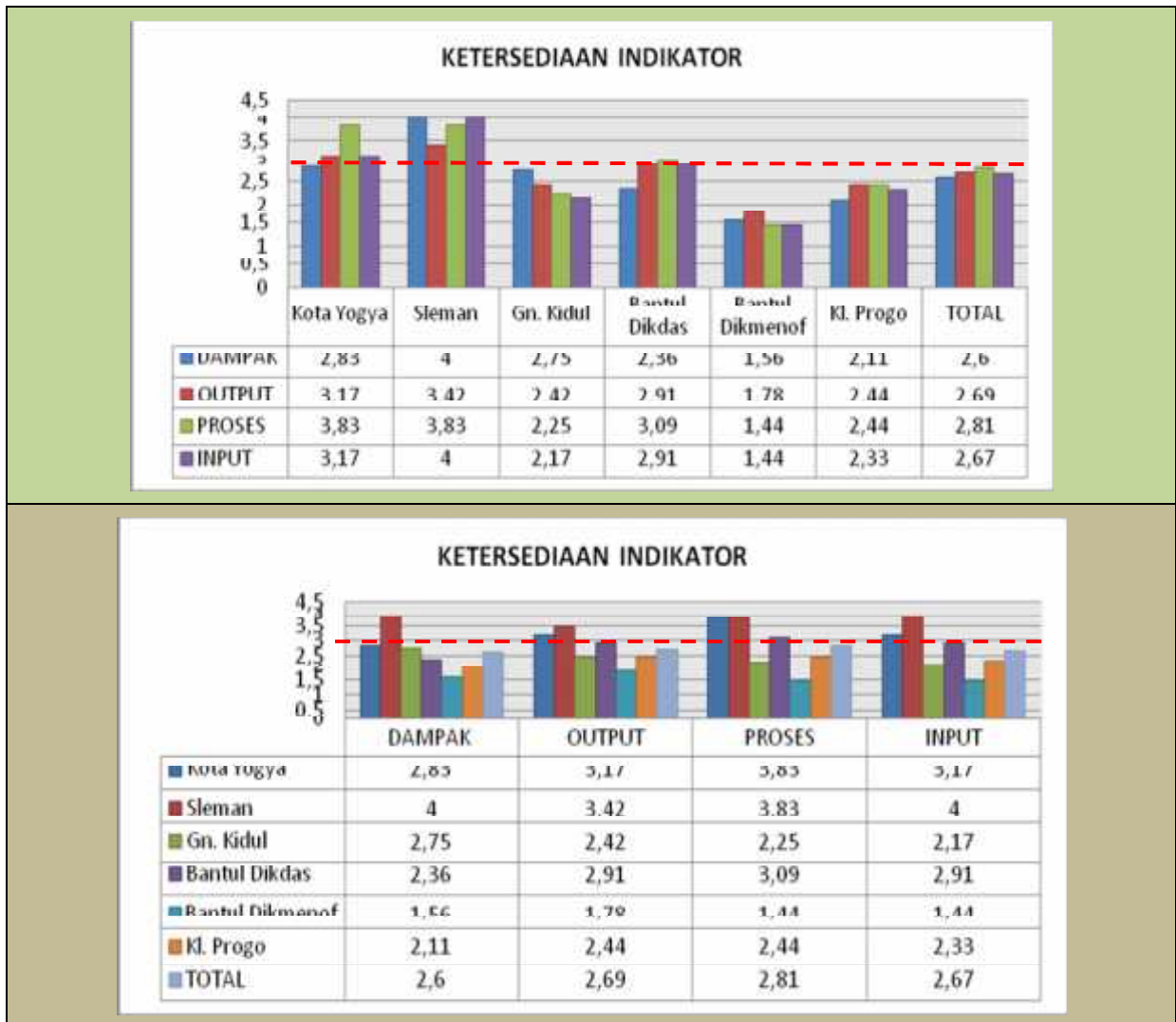
Di dinas pendidikan pada umumnya sudah cukup intensif aktivitas pencatatan informasi, penyimpanan informasi, dan pengaturan sehingga mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkannya; namun nampaknya agak kurang intensif upaya aktif untuk menyampaikan kepada pihak yang memerlukannya. Berbagai bentuk upaya agar pengetahuan dan informasi dikuasai oleh berbagai pihak dari yang paling banyak dilakukan adalah: berbagi informasi dengan sejawat, dituangkan ke dalam bentuk workshop untuk menghasilkan rencana kerja nyata; di samping itu juga diusahakan melalui publikasi baik untuk kalangan luas maupun kalangan terbatas. Dari perspektif ini yang melaporkan dirinya intensif dalam penyebaran informasi adalah dinas pendidikan Sleman dan Kota Yogyakarta dalam posisi cukup intensif. Di wilayah lain pada kondisi kurang.

Ujud dari upaya pendayagunaan pengetahuan dan informasi adalah sebagai dasar untuk melakukan tindakan nyata pemecahan masalah, atau sebagai dasar dihasilkannya program baru, beserta alokasi anggaran biayanya. Kegiatan dalam bentuk perintisan atau R&D masih kurang menjadi perhatian dinas pendidikan; hal ini berarti bahwa kalau ada gagasan hanya ada dua kemungkinan, diterapkan secara luas, atau penerapan kasuistik; tidak ada yang bersifat perintisan, sebelum akhirnya diterapkan dalam skal luas. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman melaporkan dirinya pada posisi lebih dari cukup. Bantul dengan dua dinas, tampil berbeda; pada dinas pendidikan dasar melaporkan dirinya sedikit lebih maju dibandingkan dengan dinas pendidikan menengah dan nonformal yang masih pada posisi kurang.

Hasil FGD dengan jajaran dinas memang ditemukan bahwa ada beberapa langkah terobosan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, di antaranya adalah yang sudah lama adalah penerimaan peserta didik baru melalui sistem *online*, kemudian dalam kaitannya dengan kepedulian terhadap anak-anak dari keluarga miskin, sudah beberapa tahun ada JPD (Jaminan Pendidikan Daerah), belakangan ada BOSDA, dan yang penerapan model kuota, di mana 20% dari daya tampung sekolah disediakan untuk anak dari keluarga pemegang KMS. Kebijakan kuotanisasi ini menjadi perhatian dinas, karena dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah baru, yakni secara sosial-psikologis anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak selalu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang kebanyakan dari kalangan menengah ke atas.

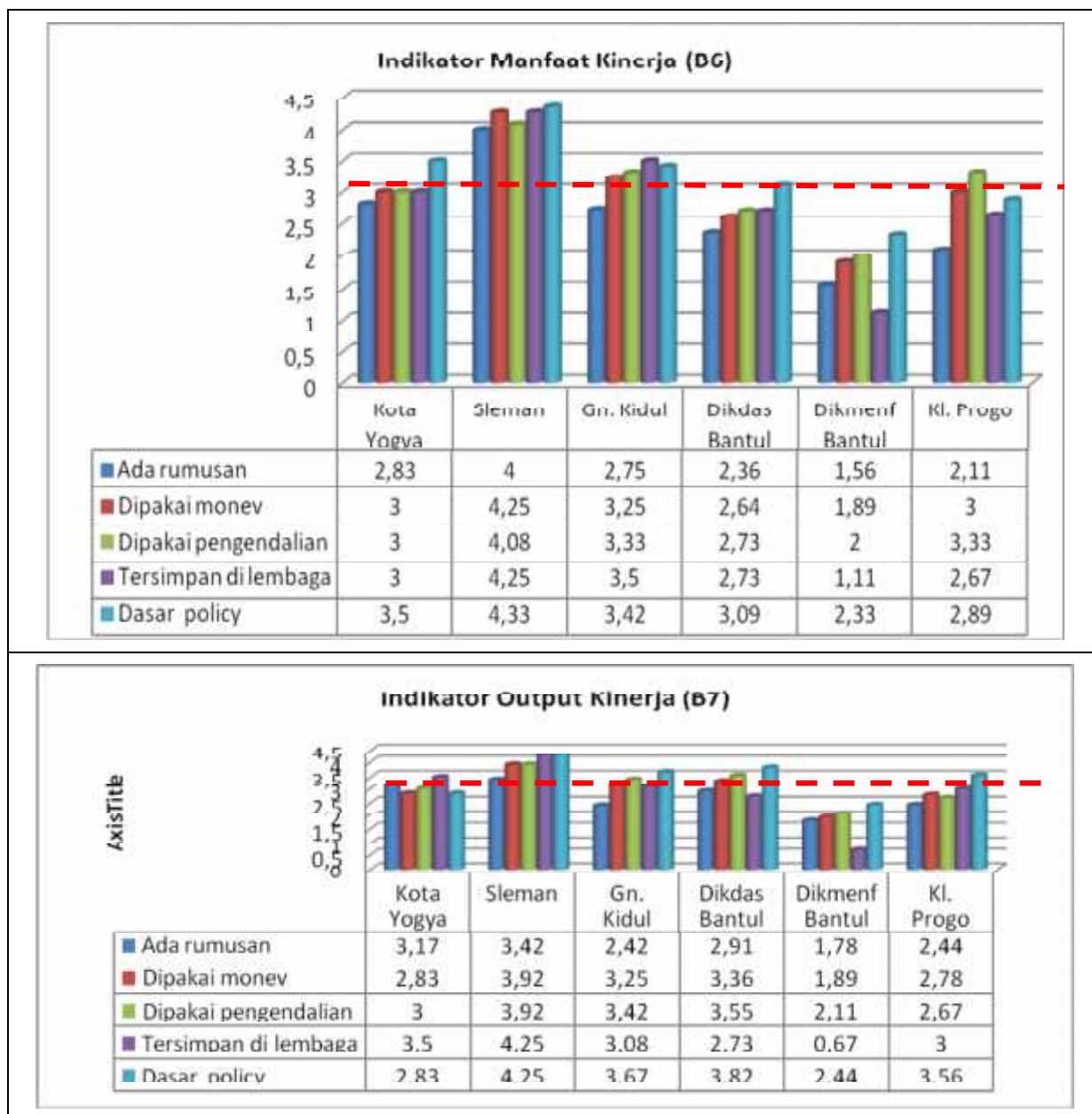
Bagian berikut menyajikan data terkait dengan kebijakan akuntabilitas pelayanan publik yang senantiasa menghendaki adanya indikator terukur dari setiap kebijakan pelayanan publik.

Dalam laporan ini dimulai dengan indikator dampak dan indikator hasil kinerja pelayanan publik dalam bidang pendidikan; diawali dengan menampilkan data tentang ketersediaan rumusan indikator (dampak, output, proses, input). Ketersediaan indikator ini menjadi dasar untuk memaknai data penggunaan indikator tersebut.



Gambar 4.19. Ketersediaan indikator kinerja

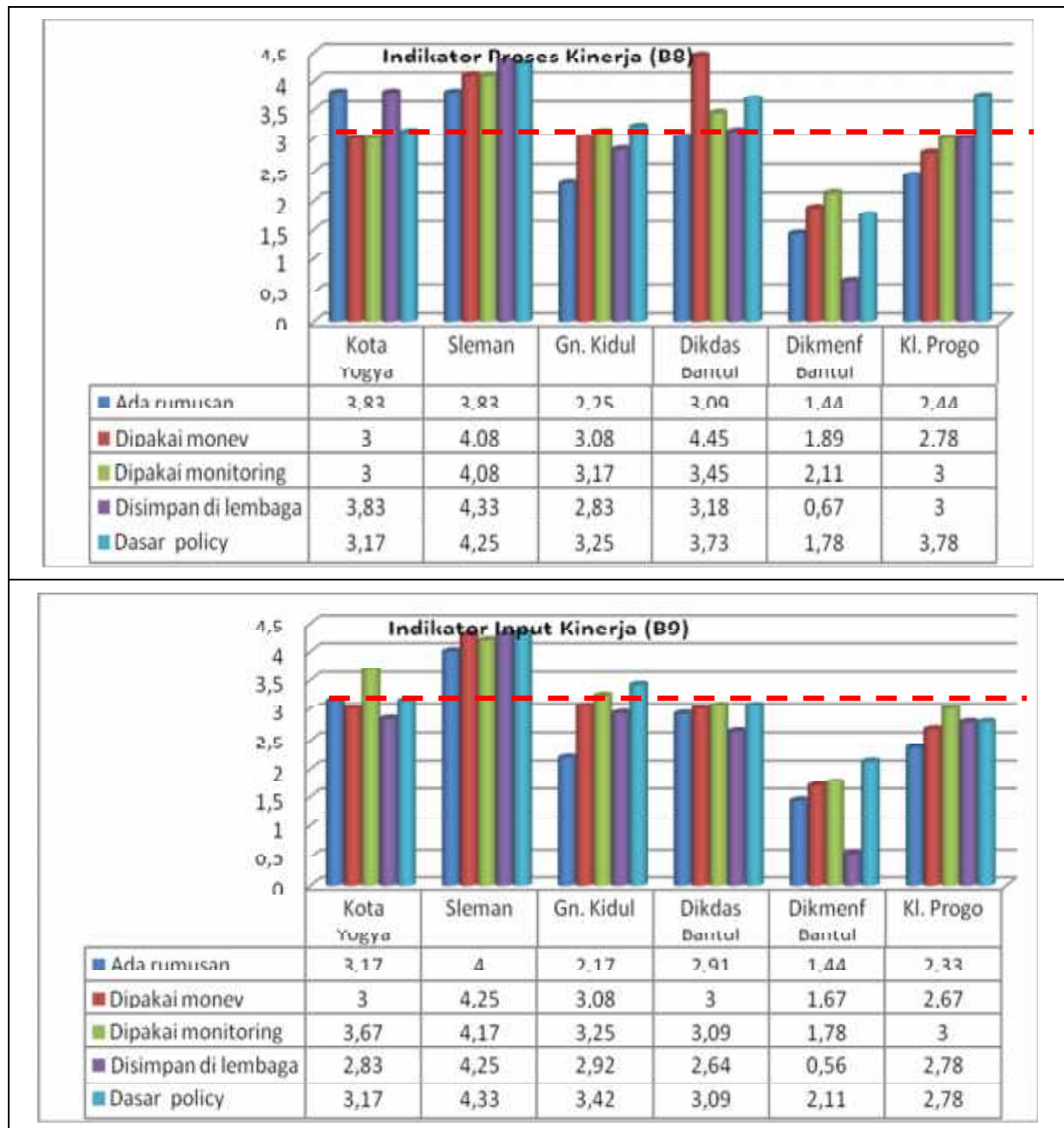
Pada umumnya tingkat ketersediaan indikator belum mencapai posisi cukup (3,0) kecuali Sleman dan sebagian aspek di Kota Yogyakarta; di samping itu, perhatian terhadap indikator proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan perhatian terhadap indikator output dan indikator dampak (outcome). Hal ini berarti bahwa di dalam setiap implementasi kebijakan/ program lebih mementingkan kepatuhan terhadap rencana dan peraturan; sementara itu capaian hasil dan apalagi dampak yang ditimbulkannya bersifat sekunder. Dengan kata lain perhatian terhadap efikasi kebijakan/program belum memadai.



Gambar 4.20. Indikator kinerja manfaat dan hasil

Pemanfaatan data terkait dengan indikator manfaat dan indikator hasil pada umumnya belum mencapai posisi cukup (3,0); dan di antara yang kurang-kurang tersebut yang relatif menonjol adalah dipakai untuk kepentingan monitoring dan kepentingan pembuatan kebijakan, tentunya pada level implementasi. Di antara ke lima wilayah, ada disparitas yang menarik yakni Sleman yang melaporkan dirinya pada posisi melewati garis cukup, dan Bantul Dikmenof yang melaporkan dirinya masih pada posisi kurang.

Bagian berikut menampilkan temuan tentang pemanfaatan informasi indikator proses dan indikator input.



Gambar 4.21. Indikator kinerja: proses dan input

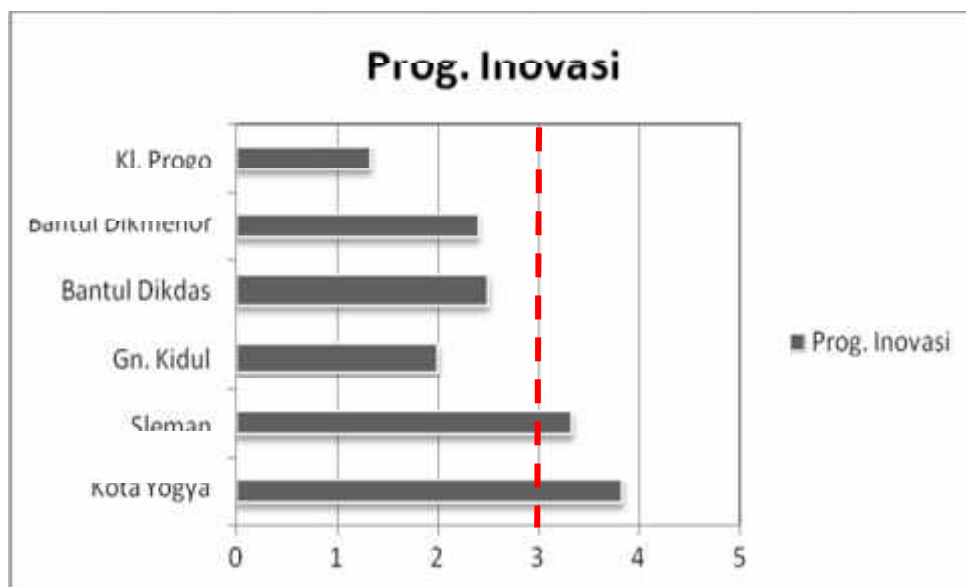
Temuan mengenai pemanfaatan informasi tentang indikator proses dan input tak jauh berbeda dengan indikator manfaat dan indikator hasil dari setiap program. Dilaporkan bahwa pemanfaatan yang relatif menonjol di antara yang masih kurang adalah bahwa informasi indikator proses dan input dipakai untuk kepentingan pemantauan dan kepentingan kebijakan. Laporan Sleman tampil yang paling intensif, dan sebaliknya Bantul Dikmenof masih pada posisi kurang.

Dengan masih lemahnya indikator hasil dan apalagi indikator manfaat; maka pemanfaatan indikator proses untuk kepentingan monitoring dan evaluasi atau monev yang juga masih al kadarnya, dapat diduga bahwa monev-pun juga kurang peka untuk memantau progress atau kurang dapat melakukan deteksi dini, apakah program yang sedang berjalan sudah ada tanda-tanda bergerak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kabupaten Bantul berbeda dari kabupaten lain; ada dua dinas pendidikan yakni Dinas Pendidikan Dasar, dan Dinas Pendidikan Menengah dan nonformal. Tidak kalah menariknya adalah bahwa ke dua dinas tersebut tampil berbeda, di mana Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal masih pada posisi kurang, sedangkan Dinas Pendidikan Dasar sudah pada posisi mendekati cukup.

C.3. LINGKUNGAN LEVEL TIGA: manajemen pengetahuan

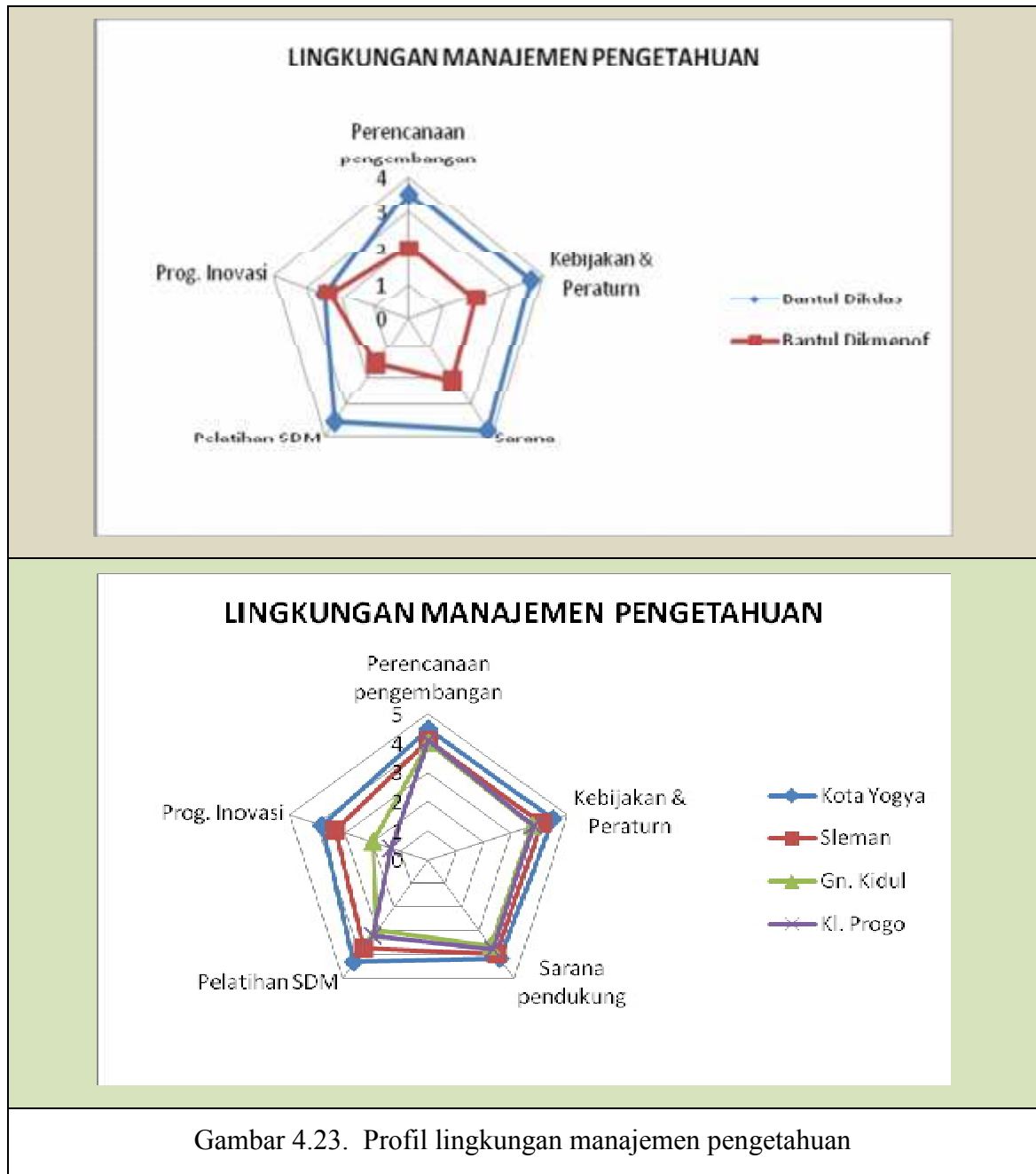
Lingkungan manajemen pengetahuan inilah yang dapat membantu menjelaskan tingkat keinovatifan dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan kabupaten/kota. Menurut pengakuan masing-masing dinas, gambaran keinovatifan tersebut sebagai berikut.



Gambar 4.22. Pengetahuan sebagai dasar inovasi

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tiga wilayah masih belum mencapai posisi cukup; dan baru Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang sudah melaporkan pada posisi cukup inovatif. Kulon-Progo pada posisi sangat kurang, Gunung Kidul pada posisi kurang; dan

Bantul baik Dikdas maupun Dikmenof meskipun pada indikator lain berbeda, pada bagian ini tampil pada posisi sama-sama masih belum cukup inovatif. Bagaimana kondisi tersebut terjadi atau apa saja yang sudah dilakukan di masing-masing daerah, laporan yang masuk ditampulkan di dalam gambar berikut.



Ada empat informasi yang berhasil dikumpulkan, yakni: perencanaan pengembangan pengetahuan, dibuatnya kebijakan atau peraturan, disiapkannya sarana pendukung, dan disiapkannya SDM untuk mendukung berfungsinya manajemen pengetahuan. Bantul Pendidikan Dasar melaporkan bahwa ke empat hal tersebut telah cukup memadai; sebaliknya

Bantul Pendidikan Menengah dan Nonformal memang masih pada posisi kurang; meskipun diakui bahwa keinovatifan tidak jauh berbeda.

Pada tiga daerah yang lain menampilkan profil serupa dengan tingkat intensitas yang berlainan. Kulon Progo dan Gunung Kidul memang tidak menonjol dalam ke empat unsur pendukung terjadinya ide inovatif. Sementara itu Kota Yogyakarta meyakinkan dengan sudah cukup tersedianya unsur pendukung; dan Sleman meskipun merasa dapat melahirkan ide inovatif, akan tetapi diakui bahwa banyak kendala untuk mewujudkannya misalnya terbentur pada kendala pembiayaan, di samping tuntutan peraturan yang dirasa ketat.

Di dalam bagian berikut dipaparkan hasil FGD di masing-masing dinas, dihadiri oleh pejabat di tingkat dinas yaitu kepala bidang/bagian atau seksi; yang mereka ini adalah responden dari instrumen tertulis. FGD tersebut diaksudkan untuk saling mengklarifikasi atas informasi yang disampaikan secara tertulis; dan untuk menggali data, informasi, dan ide yang tidak tertuangkan di dalam daftar isian/ angket yang dipersiapkan oleh peneliti. Paparan berikut dapat dipakai sebagai informasi pelengkap, dan atau sebagai cara melakukan triangulasi.

IV. D. HASIL FGD

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
KOTA YOGYA- KARTA	<p>Kepala Dinas Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendidikan karakter/watak sebagai inovasi sudah dapat dilaksanakan, misal siswa dan guru (putra) yang tidak seragam, atau melanggar aturan lalu lintas diberikan peringatan. Program pengembangan karakter dikembangkan dengan cara membentuk karakter yang baik dimulai dari guru diwujudkan dalam kurikulum (harapannya program ini dapat dibakukan, diadopsi nasional). 2. Di Yogya meyakini bahwa penyelenggaraan pendidikan sudah dapat dijalankan dengan baik, tapi menghadapi masalah berupa belum meratanya akses pendidikan bagi semua warga Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan kebijakan sekolah inklusi (kelas CI istimewa di tingkat SD). 3. Dinas pendidikan juga menyelenggarakan program perputaran pelajar dengan alasan menyadarkan bahwa Indonesia adalah utuh sehingga nilai kebangsaan perlu ditanamkan ke pribadi siswa. Program ini dilakukan setiap tahun dengan jumlah siswa 20 orang. Adapun hasil pengetahuan siswa diwujudkan dalam karya “Indahnya Seribu Perbedaan”. 4. Menerapkan system penerimaan siswa baru dengan system berbasis ICT yang dikenal dengan PPDB-RTO sebagai upaya untuk mengatasi kerawanan penerimaan siswa dengan system manua. 5. Akan memunculkan kebijakan konsultasi belajar siswa (KBS) secara online untuk mengatasi masalah siswa yaitu kesulitan dalam mengerjakan PR, karena dukungan keluarga pun kurang serta ketiadaan fasilitas. <p>Kabid Pendidikan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas pendidikan dipandang sudah dapat menerapkan manajemen berbasis informasi. Manajemen berbasis informasi dilakukan yang dilakukan dipandang berguna, karena informasi yang terjadi di dinas pendidikan/departemen lebih mudah ditangkap misalnya beragam kebijakan; dan informasi yang ada di masy mudah diperoleh. Informasi dimaknai sebagai cakupan regulating assesmen, selanjutnya dilakukan kajian, menentukan kebutuhan dan menghasilkan kebijakan. 2. Mengeluarkan kebijaksanaan pendidikan agama berbasis 	<p><i>Ada beberapa contoh inovasi dlm kebijakan pendidikan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Komitmen pemkot: BOSda</i> • <i>Membantu akses anak dari klg miskin: JPD; kuota 20%.</i> • <i>PPBD-RTO</i> • <i>Rintisan sekolah inklusi</i> <p><i>Kebijakan tersebut bertitik-tolak dari data/informasi ttg:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Banyaknya anak miskin tak dapat sekolah</i> • <i>BOS tidak mencukupi kebutuhan operasional sekolah</i> • <i>Keberadaan ABK</i> <p><i>Prosedur legal formal ditempuh, dg Perwal yang mengacu pd Perda Pendidikan</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>efektif. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan informasi yang diperoleh yaitu keresahaan dalam moral anak-anak khususnya pendidikan agama. Pendidikan agama dipandang lebih pada orientasi kognitif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menerapkan regulasi penyusunan laporan sebagai respon pada kebijakan pemerintah berupa adanya PP no. 48 dari pusat pada jenjang SD-SMP, yang menegaskan untuk mengelola pembiayaan dari pemerintah harus maksimal,. Selama ini proses pelaporan dan akuntabilitas masih dipandang menjadi persoalan. 4. Terkait hal di atas, ada kebijakan mengenai sumbangan dana sukarela. Hal ini karena sekolah SD dan SMP dilarang untuk memungut biaya, padahal dimungkinkan ada pihak donatur yang mau menyumbang. 5. Terkait tugas guru dalam mengajar, dimana guru harus dapat memenuhi 24 jam dalam mengajar/minggu, terdapat masalah bahwa mutu guru masih beragam dan masih dipandang kurang kuantitasnya. Kebijakan yang diambil adalah penambahan rombongan belajar <u>tanpa menambah kuota</u> dan pengembangan kurikulum dengan batas-batas tertentu (tambahan ruang). <p>Ka. Bidang Pengembangan</p> <p>Manajemen pengetahuan dimaknai di dinas pendidikan kota Yogyakarta sebagai manajemen informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah kota Yogyakarta menyediakan <i>best practice</i> walau masih sedikit. Dalam mengimplementasikan <i>best practise</i> kadang mengalami kurang sesuai apabila diarahkan kepada kebijakan pusat misalnya terkait dengan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) untuk biaya personal siswa; yang sebelum ada PP No 48 memungkinkan tersedianya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan; namun setelah ada PP dimaksud maka JPD dan BOSda sebagai inisiatif daerah menjadi kurang signifikan, karena kemudian sekolah dilarang memungut biaya pendidikan. 2. Selain itu, pengembangan pendidikan di kota yogya karena partisipasi masy misal kasus SMP 5, dll yang merupakan sekolah favorit, dan juga karena <i>parental choice</i>. Namun, setelah ada PP tersebut, partisipasi masyarakat menurun padahal partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pendidikan. 3. BOSda dilakukan untuk menutupi kekurangan BOSnas, 	<p><i>Best practice ini rintisan pengumpulan informasi untuk dapat menjadi pengetahuan organisasi (dinas)</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>dg modifikasi item2 agar tidak <i>double counting</i>. BOSda misal untuk biaya operasional anak/siswa. Dan kelembagaannya ada UPT JPD di tingkat dinas pendidikan.</p> <p>Ide terkait wajib 12 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Yogyakarta telah <i>melaunching</i> program ini, dan pengembangannya diwujudkan dengan menyediakan keterjangkauan pendidikan berupa subsidi silang; dan sebagai pelaksana teknisnya dibentuk UPT Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). 2. Selain itu, dinas pendidikan berusaha mewujudkannya dengan cara mengumpulkan kepala-kepala sekolah khususnya SMA negeri untuk membahas kebutuhan biaya pelaksanaannya. Kebijakan untuk ini masih dalam proses. <p>Isu diskriminasi Isu diskriminasi yang ada biasanya berupa complain dari masyarakat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas pendidikan didatangi dari pengurus beberapa LSM, dimana mereka memandang bahwa rendahnya akses pendidikan bagi anak miskin karena keterbatasan ekonomi. Terkait complain/ aspirasi ini, dinas pendidikan membentuk BOSda. Sementara itu ada tuntutan untuk warga yang berasal dari luar kota Yogyakarta. b. Tentang BOSda dikomplain oleh PGRI yang memandang bahwa Bosda di Yogyakarta berbeda antara sekolah swasta dan negeri; di mana sekolah negeri lebih besar dibandingkan swasta. Terkait dengan complain ini, pihak dinasi juga memberikan respon kepada PGRI agar juga mengurus daerah yang belum meberikan BOSda. <p>Pendidikan nonformal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama ini, dinas pendidikan masih merasa bahwa pekerjaan atau garapan PNF masih belum tergarap. Misal terkait dengan jenjang pendidikan formal (SMP/SMA), siswa yang di sekolah formal bermasalah dan siswa yang tidak lulus UAN sehingga tidak dapat menyelesaikan studi diharapkan dapat masuk jalur PNF agar tetap menepuh jenjang pendidikan, terutama dalam konteks wajar 9 tahun. th. Banyaknya cakupan PNF diperlukan dukungan dana operasional yang perlu lebih memadai. Juga terdapat kelemahan dalam bidang PNF yaitu data dasar sasaran (anak DO) di mayarakat masih belum 	

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>dimiliki, sehingga dipandang perlu disinergikan dengan unsur di luar daerah melalui kegiatan koordinasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dipandang bahwa jalur formal, informal, dan formal adalah sebuah pilihan. Harapannya adalah jalur pendidikan tersebut dapat diharapkan dengan menyediakan berbagai bentuk operasionalisasinya; UNPK tetap di bidang PNF walau di pusat urusan Ditjen Dikmen dan Ditjen Dikdas. 3. Pendidikan anak usia dini di Yogya dibedakan menjadi PAUD formal dan PAUD nonformal. Dalam realita terdapat lembaga PAUD yang memiliki rombel siswa ganda. KB disubsidi dan TK disubsidi karena unsur politik yang kuat padahal ini dipandang pemborosan sumberdaya. Dipandang ada arogansi (pemerintah) PAUD NF yang berakibat pada lembaga TK kurang diperhatikan. (perubahan tenaga pendidik PAUD/TK). Selain itu, dipandang usulan PAUD NF dari masyarakat cukup banyak tetapi disinyalir hanya untuk mencari dana dari pusat akibatnya peningkatan APM/APK tidak jelas; sehingga perlu dibedakan regulasinya. 4. Permasalahan lain dalam bidang PAUD adalah disinyalir banyak PAUD <i>abangan</i> (muridnya dari TK) yang meminta bantuan dana. Jumlah PAUD masyarakat sebanyak 661. Selain itu, pembelajaran di PAUD NF dibawah standar, dibanding TK sudah standar. Dinas memandang perlu akuntabilitas PAUD. 5. PAUD Eksekutif masih belum terorganisasi. <p>Kasus sekolah swasta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah yang diselenggarakan di masyarakat (swasta) ada persoalan akuntabilitas dan transparansi; termasuk komitmen tentang akses anak miskin masih kurang. Terkait dengan dengan BOSda, BOSda masih belum banyak memberikan dampak penurunan biaya di sekolah swasta. Swasta kadang menarik biaya tinggi. Hal ini menuntut komitmen politik. 2. Umumnya sekolah swasta cenderung diperuntukan bagi mereka dari kangan marginal, padahal sekolah swasta membantu pemerintah. Sekolah swasta tidak dapat banyak perhatian, dan hal ini menjadikan ironi dalam pendidikan. Misal KMS kurang jelas proses dan prosedurnya, salah sasaran, dan menimbulkan konflik di masyarakat karena ada masyarakat yang bermental miskin. 	<p><i>Ini fenomena baru, ada “demand” spesifik kelompok menengah ke atas.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
KAB. KULON- PROGO	<p>A. Dikdas KP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi perubahan di Dikdas Kulon Progo; misal semula guru dan kepala sekolah kurang memahami BOS, sekarang mampu memamami manajemen keuangan dan asset di Kulon Progo. Hal ini dikarenakan pihak dinas memberikan pengetahuan mengenai acuan pengelolalan keuangan. 2. Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara spontanitas; misal aturan dari hirarki/aturan kemudian didiskusikan dan disosialisasikan. Pengetahuan dapat berupa pengalaman, yang disharingkan / koordinasi, juga melalui rembuan. (mengembangkan koordinasi). 3. Berbagai aturan dari atas (pusat) diterjemahkan ke level lebih rendah, dan selanjutnya diterjemahkan ke level sendiri/micro. Hasil penerjemahan ini ada yang digunakan untuk kepentingan partial; tapi ada hasil yang digunakan untuk kepentingan semua/masalah makro. Misal masalah makro adalah penanganan guru yang dipandang sudah jelas, namun penanganan untuk guru TK/SD masih merupakan masalah mikro dimana berbeda-beda karakteristik masalahnya. Masalah-masalah micro dicarikan solusinya masing-masing, selanjutnya diambil kesimpulan, disampaikan kepada kepala dinas. <p>B. PAUDNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak dinas melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dinas pendidikan memberikan kesadaran bahwa sekolah menjadi sesuatu yang penting, dan bukan menjadi beban atau tugas pemerintah semata. Khususnya, bidang PAUD yang dipandang masih belum mendapat perhatian yang utama diharapkan berkembang dengan cara penggalangan dana melalui sejuta koin, iuran dari masyarakat. Walau saat ini kegiatan ini belum semua sama. <p>Gerakan sejuta koin, berupa masing-masing kepala keluarga mengumpulkan point/koin; secara kolektif dana yang terkumpul diambil oleh petugas dari desa. Dana yang terkumpul digunakan untuk pengembangan PUAD di daerah masing-masing. Gerakan ini pada September 2012 akan <i>dilounching</i> oleh bupati. Program ini didasarkan pada pernyataan bahwa masyarakat ingin membantu mengembangkan PUAD. Sampai saat ini sekitar 8 – 12 juta per tahun terkumpul di setiap</p>	<p><i>Di daerah ini sulit ditemukan adanya kebijakan inovatif; yang ada adalah kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat agar sesuai dengan kondisi setempat.</i></p> <p><i>Kebetulan ada bantuan stimulan Bank Dunia untuk pengembangan PAUD.</i></p> <p><i>Ini contoh munculnya kreatifitas daerah dalam pendidikan.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>desa. Di masyarakat, terdapat perbedaan aspirasi pada program ini dimana di daerah pegunungan malah mendukung program ini dibanding daerah kota, dan pantai.</p> <p>2. Permasalahan yang dihadapi diatasi melalui SOP/panduan.</p> <p>C. Kesektariatan</p> <p>1. Sumber acuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya satu acuan. Di kesekretariatan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, pekerjaan yang menyangkut hal yang sifatnya rutin dan sederhana (misal: absen) dilakukan untuk melalui mencontoh/ menejemen <i>adate</i> (menurut kebiasaan). Sedangkan, permasalahan yang kompleks dan dampak luas pada PD dan guru, pemecahannya didasarkan pada info/pengetahuan, dan SOP yang ada. Sebagai contoh, ketika hampir ada demo guru Dikdas, dimana mereka menginginkan jam ekstra diakui, dilakukan pengkajian dan kemudian dicarikan solusinya.</p> <p>2. Dalam upaya penyebaran informasi, dinas pendidikan memberikan perhatian yang cukup. Informasi yang ada di dinas pendidikan sering mendadak munculnya dan untuk menyebarkannya dilakukan tidak hanya menggunakan surat yang kadang dianggap bias (karena lokasi sekolah yang beragam), dan kadang apabila melalui pertemuan kerepotan.</p> <p>3. Rencana dinas pendidikan untuk menyebarkan informasi adalah melalui Model SMS <i>gateway</i>, sebagai rintisan berbasis <i>web</i>.</p> <p>4. Selain penyebaran melalui sms dan surat; media yang digunakan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Website kulonprogo masih rintisan, ikut web pemda. Buletin belum punya. Workhsop/bintek untuk kebijakan yang mendalam/besar dilakukan untuk menyampaikannya. Kelompok kerja: K3S, MKKS. <p>5. Indikator evaluasi: SPM Bidang Pendidikan menjadi acuan, dari kementerian. Kreasi sendiri belum terwujud karena Perda belum ada.</p> <p>D. PNFI</p> <p>Kebijakan pusat digunakan oleh PNF, namun ada perbaikan di level praktek.</p>	<p><i>Pemanfaatan informasi untuk mengatasi persoalan non rutin</i></p> <p><i>Modus-modus penyebaran informasi dg memanfaatkan teknologi informasi.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>E. DIKMEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi melalui kelompok kerja (K3S, MKKS), yang tertemuan setiap I bulan sekali. Informasi disebarkan dengan cara pengiriman SMS, dan melalui email / TIK khusus untuk pendapataan sekolah di lingkungan kesektarian dinas pendidikan. Forum ini dipandang efektif, karena sekolah semua sudah mempunyai sarana email. 2. Dalam pengelolaan SMA/K, tidak mendapatkan BOS sehingga dituntut ketransparanan dalam pengelolaan uang RAPBS dari sekolah-sekolah. Saat ini masih beragam pengelolaan RAPBS, dan pihak diknas masih memiliki terbatas akses ke sekolah mengenai transparansinya. Untuk mengatasinya, dimunculkan gagasan atau ide membuat soft ware khusus manajemen RAPBS untuk semua (dapat berupa modeling) dengan terlebih dahulu meningkatkan SDM dan TIK-nya misalnya melalui bintek. 3. Di Kulon Progo muncul sekolah SMK yang lebih focus pada vocasioanl yang belum banyak di masyarakat yaitu SMK Perawat, SMK Farmasi, dan SMK Depok Bidang, Pertanian. Adanya SMK-SMK ini terdapat masalah berupa personalia/guru untuk mata pelajaran produksi belum memadai (usulan: UNY diminta menciptakan). Padahal, SMK dipandang menarik karena spectrum kajian banyak, sehingga dicari yang paling laku di pasar. Adanya SMK ini menimbulkan permasalahan di tingkat Dinas dan aturan kepegawaian bahwa tenaga hononer tidak boleh diangkat, dilarang oleh Permen, namun terpaksa diangkat karena kebutuhan guru yang kurang memadai. Kondisi ini atau pemikiran ini perlu ditangani serius oleh dinas pendidikan. 	<p><i>Ini contoh ide kreatif tentang pendidikan kejuruan, bagaimana terobosan diperlukan untuk merespon kebutuhan.</i></p>
<p>KAB. SLEMAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid PNF <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan layanan pendidikan nonformal memiliki sasaran yang berbeda-besa. Masyarakat terkadang tidak mengetahui akan adanya layanan pendidikan nonformal sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh pemangku kepentingan. Saat ini penyelenggaraan PNF masih mengacu pada program pokok dari kebijakan pemerintah misalnya wajib belajar, keaksaraan, dll. b. Manajemen pengetahuan dapat dipahami, tetapi dalam pelaksanaannya masih terbentur pendanaan 	<p><i>Di daerah ini ditemukan bahwa mampu mengidentifikasi pemecahan masalah, akan tetapi tidak selalu sampai berhasil mengatasi kendala, termasuk pembiayaan.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>misalnya penting ESQ dikembangkan namun belum terkoordinir dalam program karena platform dana kurang tersedia.</p> <p>c. Di bidang PNF, berbagai masukan (informasi) dari masyarakat seharusnya dipahami sebagai informasi untuk mengembangkan program tapi karena dana belum ada maka belum tersedia informasi.</p> <p>d. Informasi di satuan kerja berbeda-beda (misalnya mengenai kompetensi, dll) sehingga ada perbedaan</p> <p>e. Harapan/usulan: hasil penelitian bisa diterapkan tindaklanjutnya. Pelatihan dibutuhkan untuk MBP di masa depan.</p> <p>2. Kabid. Sarpras</p> <p>Tupoksi bidang sarana prasarana sesuai dengan petunjuk teknis dalam pengelolaan prasarana; yang mana kadang juknis tidak jelas, sehingga ada kelonggaran dalam menerjemahkan juknis sesuai dg kondisi yang ada.</p> <p>3. Ka. Pembinaan Guru dan Siswa</p> <p>a. Bidang Pembinaan Guru dan Siswa dalam melaksanakan tupoksi menggunakan SOP. Rutinitas dan mencontoh best practise digunakan lebih banyak dilakukan, dengan tetap mengacu pada pusat.</p> <p>b. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dalam satu satuan kerja. Bukan individu semata.</p> <p>c. Ketika menghadapi masalah yang muncul, hal yang dilakukan adalah dengan mendeteksi dari pemahamana dan konsep.</p> <p>d. Proses produksi pengetahuan dilakukan dengan: mengetahui masalah yang ada, diteliti, dan dicari sebab-sebabnya. Hasil penelaahan akan diinventarisasi dan dibagikan kepada teman-teman yang lain melalui diskusi bersama, dan digandakan informasi baru yang diperoleh sesuai jumlah staf.</p> <p>e. Harapan: Pengembangan/ manajemen pengetahuan banyak dilakukan dalam bentuk: (1) pelatihan, (2) untuk terbitan jurnal masih terbatas, dan (3) pembinaan pada satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan dalam realitas publikasi dilakukan dalam bentuk terbitan/bulletin masih terbatas, hanya dilakukan juga bentuk pengumuman.</p> <p>f. Kegiatan inovatif yang dikembangkan berupa adanya: a) jaminan pendidikan bagi warga miskin, pada jenjang SMA/SMK; b) Sekretariat menggunakan menggunakan PERBUB APBS mengenai pengelolaan anggaran sekolah; dan c)</p>	<p><i>Ada harapan dan feedback bagi perguruan tinggi di Sleman, untuk berperan lebih besar dalam pembangunan pendidikan daerah.</i></p> <p><i>Ini ciri sistem desentralisasi, mengakomodasi kondisi daerah.</i></p> <p><i>Isian angket – A. dapat overestimate karena mengacu pada yang seharusnya, bukan keadaan yang ada.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>dalam bentuk kebijakan dari departemen tertentu yang berarti instansi lain ikut mengatur; misal BOS (pada waktu masih harus melalui APBD). Hal ini menyebabkan kebingungan implementasi.</p> <p>c. Banyak perguruan tinggi di Sleman, namun kerja sama dengan pihak dimaksud belum optimal di Sleman; sehingga dipandang belum mempengaruhi mutu pendidikan.</p> <p>d. SMM (system manajemen mutu) akan diberlakukan. Hal ini dilatarbelakangi adanya sekolah SMA yang sudah mendapatkan sertifikat ISO, sedang dinas pendidikan belum mendapatkannya. Dinas pendidikan akan menjadi pilot proyeknya. Kendala yang dipandang ada adalah peningkatan sumberdaya manusia, misal di SD banyak yg kekurangan guru pendidikan jasmani.</p> <p>e. Layanan pendidikan bagi masyarakat agar lebih optimal telah didukung oleh bantuan teknologi yang telah didapatkan oleh Dinas Pendidikan Sleman.</p> <p>f. Kendala: keterbatasan SDM terbentur dengan moratorium PNS; perkembangan teknologi informasi yang pesat, tidak selalu terkejar.</p>	
<p>KAB. GUNUNG KIDUL</p>	<p>Pemda Gunung Kidul berusaha menerapkan sistem pengendalian internal meskipun SOPnya masih baru akan dibuat. Hal ini dipandang penting terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>A. Informasi/pengetahuan</p> <p>Informasi atau data yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan daerah saat ini telah menggunakan data atau informasi yang bersumber dari instruksi pemerintah (DATA terpusat), dimana sebelumnya menggunakan data manual di tingkat kabupaten. Untuk ini sudah ada panduan terkait dengan delapan standar pendidikan. Di samping itu kondisi kini data juga belum siap, misalnya data tentang anak dari keluarga miskin.</p> <p>B. Pelaksanaan kegiatan/program pendidikan daerah:</p> <p>Mutu pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar Nasional Pendidikan, difasiltiasi dari APBD dengan pendampingan rintisan RSSN. RSSN untuk SMA ada 5, yang negeri lainnya masih rintisan (6). Wujud pendampingan berupa pemberian dana dan pembinaan, untuk justifikasi dinilai dan ditinjaulanjuti. Untuk tu ada prosedur sosialisasi dan pendampingan. 	<p><i>Sadar prinsip akuntabilitas layanan publik.</i></p> <p><i>Mencari format pendataan yang tepat.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masalah: mind set untuk membuat KTSP di sekolah masih sulit, masih adopsi/meniru. Di tingkat SMP/SMA masih lumayan, ketika di tingkat SD masih jauh dari harapan karena SDM yang masih kurang (Idealnya: SDM guru berkualitas). Misal penentuan standar lulus masih ditetapkan rendah, padahal di tempat lain sudah tinggi. Penentuan nilai yang tinggi dirasakan takut, ada tes remedial, bukan remedial teaching. ▪ Meskipun oleh pusat daerah diharapkan dapat mengembangkan SDM, daerah tidak mampu. ▪ KKG MGMP diharapkan dapat berhasil, kegiatan ini mendapat anggaran tinggi yang diharapkan peningkatan kualitas guru dapat merata. Kegiatan ini dilakukan dalam satu tahun atas dorongan APBD sebesar Rp 5 juta per MGMP. Hasil dari kegiatan ini berupa standar penilaian dan RPP. Standar penilaian ini diapandang penting untuk menghilangkan praktik yang salah memaknai KKM, di mana hasil belajar belum mencapai KKM tetapi sudah diberi nilai minimal KKM. Dalam kegiatan ini juga dibahas berbagai hal terkait dengan nilai UAN yang terjadi di wilayah kabupaten lain kemudian dicermati, dan dibahas untuk selanjutnya menjadi masukan untuk menjadi pendorong setiap kepala sekolah untuk meningkatkan hasil UAN agar tidak jauh di bawah rerata provinsi. Dalam perjalanannya, program ini mengalami permasalahan berupa anggaran dari dinas yang terus menurun. <p>WAJAR /PUS</p> <p>1. Di Gunung Kidul, anak usia 7 – 15 dalam kenyataan sudah dapat sekolah atau sebagian besar dapat berpendidikan formal, dan menunjukkan APM di Gunung Kidul cukup tinggi. Begitu pula anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan. Namun, di Gunung Kidul terdapat masalah dalam rangka PUS yaitu lulusan PLP masih kecil terutama di pinggiran pantai, sebesar 48 % APK SMA. Mereka mayoritas menjadi pekerja sektor formal <i>unskilled</i>, dan berperilaku merantau. Hal ini terkait dengan pendidikan orang tua yang dipandang masih rendah, pandangan pendidikan tidak memberikan manfaat langsung, akses keterjangkaun dipandang tinggi (operasional pribadi).</p> <p>SMK. Untuk pendidikan menengah di Gunung Kidul kecenderungannya 70 % jumlah murid sekolah menengah atas adalah masuk ke SMK. Akibatnya, jumlah siswa SMA swasta mengalami penurunan.</p> <p>PAUD</p>	

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>1. Pergerakan dan pengembangan PAUD di Kabupaten Gunung Kidul sangat cepat. Berbagai kelompok PAUD dibentuk untuk menyediakan layanan pendidikan PAUD yang dapat mencapai pada setiap wilayah perkotaan dan perdesaan yang ada di Gunung Kidul. Dalam perkembangannya, terdapat pengembangan PAUD dihadapkan pada masalah yaitu ada paradigma yang keliru di masyarakat berupa kekhawatiran keinginan tenaga pendidikan PAUD untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dimana kondisi riil jumlah pegawai di gunung Kidul sebanyak 8 ribu orang berstatus PNS; dan 4 ribu orang sebagai GTT. Guru GTT inilah yang cenderung berkeinginan menjadi PNS, padahal tidak semuanya kompeten. GTT di masyarakat dipandang sebagai orang yang memiliki status sosial tinggi dan ekonomi mapan (diindikasikan dengan symbol seragam) sehingga pengakuan ini menjadi pemicu tuntutan mereka. Saat ini insentif bagi GTT sebanyak Rp. 100 ribu per bulan yang didanai dari APBD Kabupaten. Khusus untuk guru GTT sekolah dasar ada insentif bantuan yang bersumber dari BOS, dan di SMA ada sumber dari masyarakat.</p> <p>2. Program Bank Dunia untuk mengembangkan PAUD di Gunung Kidul diwujudkan dengan pemberian fasilitasi/ stimulan PAUD. Mengingat tidak selamanya program ini dilaksanakan, dan program ini tidak berhenti maka pemerintah memberikan stimulan. Walau ada kekhawatiran bahwa semua lembaga PAUD meminta terus stimulant.</p> <p>Tendik: TU dan bendahara</p> <p>1. Penyediaan tendik sebagai bendahara dipandang menjadi beban saat ini. Hal ini karena jumlah siswa tiap sekolah sangat berbeda. Ada sekolah dengan jumlah siswa yang banyak, dan sebaliknya ada sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit. Saat ini tenaga bendahara dan adminstrasi masih oleh guru yang difungsikan akibatnya guru terbebani oleh kegiatan administratif.</p> <p>2. Kendala: Format nasional tidak samapi menyentuh hal-hal spesifik karena misal di GK kendalanya adalah keterjangkauan; rasio guru SD 1 : 17 nampaknya masih belum sesuai dg teori, mutu baik kelas kecil.</p> <p>SMP satu atap dan SMP Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Di Gunung kidul SMP satu atap dan SMP terbuka sudah tidak ada lagi. Sekolah Dasar (SD) mengalami 	<p><i>GK juga mendapatkan bantuan stimulan Bank Dunia utk PAUD</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>kematian dan yang berkembang SMP nya. Kematian SD-SD disebabkan ketidakadaan calon murid/murid yang bersekolah. Akibatnya dilakukan <i>regrouping</i> SD, dan regrouping ini dipandang efektif untuk mencari siswa dan para guru selanjutnya dipetakan dan ditempatkan (ditugaskan) ke SD-SD lain yang kekurangan guru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide-ide: pembentukan kelas kecil yang hanya memerlukan beberapa orang guru. <p>Guru tidak tetap (gtt)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuntutan guru menjadi PNS cukup kuat, diperkuat dengan PP 48 tentang pengangkatan guru honorer, dan implikasinya adalah semua GTT menjadi masuk kriteria pengangkatan. Padahal, dipandang ada kelemahan mengenai guru honorer yaitu guru honorer yang ada direkrut tidak dengan mekanisme penyingkapan; atau langsung direkrut, yang mana ini berbeda dengan perekrutan Guru Bantu Sekolah yang melalui penyingkapan. Tuntutan ini ternyata menjadi tekanan baik pihak dinas pendidikan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pertumbuhan kuantitas GTT disinyalir karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga jumlahnya membludak. Kondisi GTT di sekolah SD sampai SMA ini menunjukkan permasalahan yang sama dengan guru-guru PAUD yang memiliki keinginan untuk menjadi PNS. Mensikapi kejadian ini, pihak dinas pendidikan setempat, merasa kurang berani mendata para GTT karena dikawatirkan memunculkan persoalan dan tuntutan yang lebih besar. ▪ Untuk hal kompensasi, pembiayaan insentif GTT bersumber dari komite, dan ada yang berasal dari BOS. ▪ Untuk pengembangan ke depan, pihak dinas pendidikan berusaha memikirkan bahwa seleksi didasarkan pada kompetensi, selektif, dan untuk mejadi PNS haru mengikuti prosedur, dll sehingga benar-benar dibutuhkan. (realitanya, mereka dibutuhkan krn kondisi di sekolah beda-beda, butuh guru). <p>Guru TK</p> <p>Terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penataan guru TK yaitu guru TK negeri tidak boleh mengajar di TK swasta, dimana tetap mengacu pada aturan dari pemerintah. Secara kuantitas, di Gunung Kidul jumlah TK negeri hanya sebanyak 5 (lima) lembaga, sedangkan untuk TK swasta berjumlah banyak. Pada TK swasta sendiri, penyelenggaraan kegiatan pendidikannya masih memprihatinkan, misal personalia yang kurang kompeten, sehingga menimbulkan permasalahan lain misalnya penguasaan metode</p>	

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai pihak yang lebih memiliki otoritas berusaha menjembatannya dengan cara memberikan tugas tambahan (ada SK) kepada guru TK negeri untuk mengajari cara mengajar di TK swasta.</p> <p>Biaya pendidikan Menurut dinas pendidikan Gunung Kidul, biaya operasional bagi peserta didik dipandang cukup tinggi; sehingga adanya BOS dipandang membantu mereka. Walaupun keberadaan dana BOS masih belum memadai dengan optimal. BOSda lebih kecil dibanding dengan BOS pusat. BOSda bersifat membantu, dimana besaran dana BOSda per siswa SMP sebesar Rp 200 rb, dan siswa SD sebesar Rp 50 rb.</p> <p>Sekola inklusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhatian dinas pendidikan Gunung Kidul terhadap anak yang berkebutuhan khusus (ABK) relative cukup baik. Anak-anak ABK dapat menempuh UAN atau tidak harus dapat menempuh UAN. Anak ABK yang memiliki kemampuan IQ rendah tidak perlu mengikuti UAN. Apabila mereka ingin melanjutkan, maka mereka harus dapat diterima lembaga pendidikan lanjutan pertama (PLP). Terkait dengan ini, terdapat masalah yang dihadapi dalam mengelola ABK yaitu: a) belum tersedia test untuk mengetahui kondisi anak, apakah anak termasuk ABK atau tidak; b) hal ini dimungkinkan adanya dana yang belum memadai; dan c) guru di SD/SMP kurang kompeten mengenai ABK; serta d) setelah kembali ke keluarga, orang tua tidak mampu membimbing karena sosial ekonomi keluarga. ▪ Bagi ABK yang sekolah di formal, di SD ada kesepakatan bahwa di satu tingkat tidak boleh tinggal lebih dari 2 tahun sehingga anak yang IQ masih belum optimal belum dapat masuk atau naik SD. Kondisi ini menyebabkan input SMP menjadi pertimbangan. <p>Penelitian karya tulis Sertifikasi dikhawatirkan membuat guru tidak mau meneliti. Masih sepertiga guru belum bersertifikasi; maka ada keawatiran terjadi ketimpangan mutu, yang tinggi makin melejit, sementara yang rendah mengalami kemandekan.</p> <p>Studi lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kualifikasi pendidik di Gunung Kidul dirasa masih belum memadai, hal ini ditandai dengan program studi lanjut bagi personalia yang masih minim. Saat ini, studi lanjut personalia cenderung mengandalkan beasiswa dari DIKTI, dan pemda belum dapat memberikan bantuan dana. ▪ Kegiatan studi lanjut dan pengembangan kualitas lainnya hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang 	<p><i>BOSda mencerminkan kepedulian pemda terhadap pendidikan.</i></p> <p><i>Belum ada jalan keluarnya.</i></p>

DAERAH	NOTULEN FGD	CATATAN/ KOMENTAR
	<p>komitmen untuk maju sehingga saat ini masih ada kesenjangan kompetensi antar guru berbeda-beda.</p> <p>Hasil sertifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada nilai UAN menjadi lebih baik pada sekolah yang mayoritas tersertifikasi (jumlah di GK $\frac{3}{4}$ % guru tersertifikasi). ▪ Tuntutan bagi mereka: belum ada; terserah guru-guru yang mendapat. Ideal: ada standar minimal mengenai tagihan hasil sertifikasi. ▪ Ada kekawatiran mendata guru, yakni bahwa mereka akan menuntut hak; meskipun kalau itdak ada data yang jelas juga akan menimbulkan persoalan. 	<p><i>Info positip</i></p> <p><i>Pendataan dilematis.</i></p>
KAB. BANTUL - DIKDAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas pendidikan Dasar Kab. Bantul dalam menyelenggarakan tupoksi mengacu pada peraturan yang ada baik tingkat nasional, maupun daerah. Program-program yang ada umumnya merupakan pelaksanaan program pendidikan yang direncanakan dan dikembangkan oleh pihak Departemen. 2. Dinas Pendidikan Kab. Bantul baik Dikdas maupun Dikmenof menyelenggarakan dan menggalakan suatu program yang dipandang inovatif yaitu: Program Pendidikan Karakter. Program ini diselenggarakan atas dukungan pemerintah Kab. Bantul. Tujuan program ini adalah menanamkan berbagai nilai positif (karakter) kepada siswa sekaligus para guru dan tenaga pendidikan. Mekanisme yang dikembangkan adalah dengan meminta kepada setiap guru mata pelajaran untuk dapat menyiapkan atau mentransmisikan nilai-nilai positif dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Selain itu, kepala sekolah mendapatkan pembinaan dari pihak dinas dan penda untuk mengembangkan program tersebut, dengan harapan bahwa setelah kepala sekolah dapat menularkan dan menyampaikan serta membudayakan pendidikan karakter dimaksud. 3. Dinas Pendidikan Dasar Bantul juga mengembangkan program pemberian minum susu gratis kepada semua siswa sekolah dasar di lingkungan Kab. Bantul dengan anggaran Rp 2 Milyar untuk setahun. Program ini bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik kepada para siswa. Pemberian minum susu ini dilakukan 2 kali dalam satu minggu. 	<p><i>Catatan ini tidak melalui FGD, melainkan wawancara individual.</i></p> <p><i>Cukup dengan kepatuhan thd peraturan.</i></p> <p><i>Pendidikan karakter integratif: kreatif sejalan dengan kebijakan nasional</i></p> <p><i>Perbaikan asupan gizi</i></p>
BANTUL DIKMENOF	Tidak ada informasi	Tidak ada FGD/ wawancara

REKAPITULASI ISIAN NARATIF DARI ANGKET

BAGIAN - A

Sumber Acuan	Masalah yang berdampak luas menggunakan: acuan peraturan seperti Permendagri No 59/2007, juklak APBD, Permendiknas, Rensrea, RPJM, UU, Perbup.; Sedangkan untuk permasalahan yang rutin menggunakan acuan berupa contoh; Selain menggunakan aturan, dan contoh; juga mendasarkan pada data dan pengetahuan yang dimiliki.	Peraturan yang ada Data dari lapangan Contoh dari best practise/rutin
TL Keberhasilan	Melakukan koordinasi internal; Membuat laporan jika diperlukan; Pengetahuan/pengalaman dari keberhasilan digunakan untuk jadi milik bersama; Menindaklanjuti kesuksesan	Koordinasi internal Pembuatan laporan; Menindaklanjuti; Menjadi milik bersama
TL Kegagalan	Kesalahan dari pengalaman untuk menjadi pelajaran; Evaluasi, Koordinasi dengan pihak terkait, Diskusi; Diteksi kesalahannya (pemahaman, salah konsep, peraturan).	Dievaluasi, diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait

BAGIAN – B

Koleksi Informasi	Pencatatan informasi	Pencatatan
Info dari Pengalaman	Pengelolaan Aset, Penyusunan SPIP, Penyusunan IFM, sertifikasi guru Pengelolaan keuangan ditingkat sekolah, menyusun juknis pengelolaan keuangan (Kepala Dinas); Sebagian menggunakan ICT	Materi sesuai bidang pekerjaan dinas pendidikan
Pemeliharaan Informasi	Dicatat, diarsipkan, disebar/disosialisasikan; diakses oleh staff; Upayanya di dokumentasikan serta diterapkan	catat, diarsip, dan diterapkan
Penerapan	1. Pengetahuan baru dikritisi dari sudut proses, hasil, dll	pengkritisian masalah

Koleksi Informasi	Pencatatan informasi	Pencatatan
informasi	2. Koordinasi dengan Ka UPTD, Pengawas, dan MKKS, KKKS 3. Informasi/pengetahuan baru akan bagus diterapkan bila sebelumnya dilakukan R & D Tentang PAUD: pemahaman, motivasi, partisipasi ortu, dll terhadap PAUD diwilayah pegunungan, pantai, dan kota. Rasa Sosialnya tinggi yang dipegunungan dan pantai 4. Diaplikasikan	koordinasi dengan para pihak terkait diaplikasikan
Penguasaan informasi	1. Agar hal baru dikuasai oleh semua ada 2 cara: - Pelatihan/ workshop bila berkaitan dgn pengetahuan dan skill - Publikasi/ sosialisasi bila hanya berkaitan dgn informasi/pengetahuan 2. Disampaikan di UPTD, Gugus Sekolah 3. Upaya yang bisa dilakukan supaya informasi/pengetahuan baru dapat dikuasai oleh semua bisa dengan berbagi cara seperti pendidikan/pelatihan,workshop, penerbitan internal, publikasi ke masyarakat, diunggah ke website,sharing. Masyarakat yang dulu belum mampu membuat administrasi & keuangan untuk PAUD sekarang hampir semua bisa dilaksanakan	Pelatihan, workshop, dan publikasi Penyebarluasan informasi melalui penerbitan buletin, surat, dan media internet
Indikator manfaat Kinerja	1. Tersedia indikator dipakai acuan dlm evaluasi pada input, proses, output 2. Tersedia sesuai petunjuk yang sudah ada 3. Tersedia indikator kinerja dipakai untuk monev & pengendalian mutu PAUD; tiap dusun ada PAUD atas partisipasi masyarakat dan juga dukungan dari pemerintah	Indikator ada, sesuai petunjuk yang ada Indikator untuk dipakai dalam evaluasi
Indikator hasil kinerja	DATA TIDAK TERSEDIA	
Indikator proses kinerja	DATA TIDAK TERSEDIA	
Indikator input kinerja	1. Tersedia sesuai petunjuk 2. Mengoreksi dan mendeteksi kegagalan yang terjadi sehingga permasalahan bisa ditanggulangi	Tersedia sesuai petunjuk; Koreksi kegagalan yang telah terjadi

BAGIAN – C

Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Dibuat program tahunan, lima tahunan3. Tersedia dan ada
Kebijakan & peratur	<ol style="list-style-type: none">1. Permen/UU, PP; Pergub/Perda2. Perlu peraturan yang jelas, kebijakan yang bijak, pelan tapi pasti
Sarana	Tersedianya fasilitas TIK yg memadai; Belum ada masih pakai milik sendiri
Pelatihan	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk PAUN perlu banyak pelatihan/workshop, magang untuk biaya bisa sharing antara pemerintah dan masy2. Ada tapi baru sebagian kecil
Program Inovasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan jaminan pembiayaan pendidik daerah2. APBS (perhub)3. Pelayanan masyarakat bebas biaya4. Biasanya terjadi dulu dengan kegiatan secara biasa-biasa5. Sekarang sudah menggunakan ICT dengan online

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Penelitian asesmen kebutuhan ini sebagai tahap awal dari pengembangan model manajemen berbasis pengetahuan/ informasi. Dari perspektif manajemen berbasis pengetahuan tersebut ada 3 (tiga) level lingkungan. Level – 1 adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dinas sebagai penyelenggara pendidikan daerah. Level – 2 adalah proses-proses menghasilkan pengetahuan baru dari pengalaman, dan pengintegrasian pengetahuan tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Level – 3 adalah manajemen pengetahuan yang kalau baik berujung dihasilkannya banyak kebijakan inovasi untuk mengatasi problem pembangunan pendidikan daerah. Berdasarkan telaah atas temuan hasil asesmen dapat ditarik kesimpulan berikut.

1. Pada umumnya jajaran dinas pendidikan melaporkan bahwa dari berbagai indikator manajemen berbasis pengetahuan kinerja dinas masih pada posisi kurang dan cukup. Pada lingkungan level-1, pelaksanaan tugas pokok/fungsi terfokus pada keterlaksanaan kebijakan/program, dan mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, apalagi kalau prosedur standar berkaitan langsung dengan pendanaan. Pada lingkungan level-2, ditinjau dari dihasilkannya pengetahuan baru masih kurang produktif; dan apalagi ditinjau dari pengintegrasian ke dalam sistem kelembagaan juga masih sangat terbatas. Pada lingkungan level-3, yaitu manajemen pengetahuan juga masih lemah, terbukti dengan langkanya inovasi dalam kebijakan/program.
2. Pada kasus tertentu asesmen diri cenderung *overestimate*, sehingga menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa lingkungan level – 3 tertinggi, diikuti level – 2 dan terendah baru level – 1. Padahal logikanya, kalau kalau pelaksanaan tugas pokok baru sampai pada tahap mementingkan keterlaksanaan dan kepatuhan, belum sampai pada keefektifan dan akuntabilitas; berarti juga kurang produktif menghasilkan dan memanfaatkan pengetahuan baru. Kalau pemerolehan dan pemanfaatan pengetahuan secara konvensional saja masih kurang, tentunya kapabilitas untuk manajemen pengetahuan juga juga masih kurang, sebagaimana masih langkanya inovasi dalam kebijakan/program. Terjadinya *over estimate*

dalam asesmen diri sendiri tersebut menandakan masih lemahnya wacana dan apalagi pemahaman mengenai manajemen berbasis pengetahuan.

B. IMPLIKASI

Lemahnya wacana dan pemahaman mengenai manajemen berbasis pengetahuan/informasi berimplikasi luas terhadap kinerja dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan daerah.

1. Lambannya perubahan kinerja pembangunan pendidikan daerah akan berlanjut, dalam konteks lingkungan budaya kerja yang ditandai dengan tingginya beban administrasi, serta beratnya resiko atas setiap penyimpangan/pelanggaran.
2. Penguatan dan pemberdayaan manajemen berbasis pengetahuan sebenarnya diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja dari sekedar sebagai pelaksana yang baik, menjadi pengelola (manajer) yang dapat mengemban tugasnya secara kreatif dan inovatif di dalam sistem desentralisasi pendidikan.
3. Majunya pembangunan pendidikan daerah jelas memiliki andil besar terhadap kinerja dan daya saing bangsa dalam bidang pendidikan, cukup besar alokasi APBN untuk pendidikan yang diluncurkan ke daerah melalui berbagai skim pendanaan, misalnya: DAK (Dana Alokasi Khusus), dekonsentrasi lewat propinsi.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, berikut ini dikemukakan beberapa rekomendasi untuk dinas pendidikan daerah dan komponen-komponen terkait.

1. Peningkatan pemahaman wawasan mengenai manajemen berbasis pengetahuan, dan aplikasinya dalam pembangunan pendidikan daerah.
2. Percepatan peningkatan kinerja dinas pendidikan kabupaten/kota melalui: penyiapan infrastruktur, SDM, dan sistem pendanaan, untuk menunjang perintisan manajemen berbasis pengetahuan.
3. Perintisan manajemen berbasis pengetahuan dimulai dengan penyiapan model evaluasi kinerja pembangunan pendidikan daerah, karena dengan model evaluasi kinerja yang tepat, dimungkinkan hidupnya sistem produksi dan integrasi pengetahuan ke dalam sistem kelembagaan kerja.